



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Jakarta

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 26 Januari 2026

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc
NIP. 197106191994031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	

C.28	Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 26 Januari 2026

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc

NIP. 197106191994031001

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara periode 31 Desember 2025 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp219.506.674.207,00.

Realisasi Belanja Negara Netto pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.083.907.177.037,00 atau mencapai 75,51 persen, nilai tersebut merupakan nilai setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp1.505.651.157,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.435.421.390.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.250.096.114.848,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp352.955.019.117,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp5.592.300.605.028,00; Properti Investasi (neto) sebesar Rp31.417.236.613,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp273.423.254.090,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp196.744.896.266,00 dan Rp6.053.351.218.582,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(430.800.291.658,00) sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp707.579.882.684,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(493.651.882.781,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar defisit Rp62.851.591.123 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(430.800.291.658,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp5.462.922.038.268,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(430.800.291.658,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp(861.198.886,00), lain-lain Rp24.872.877,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp6.053.351.218.582,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Pendapatan BLU	B.1.1	35,150,000,000	199,268,320,721	566.91	92,373,273,693
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	50,589,862,000	20,238,353,486	131.08	24,643,253,666
JUMLAH PENDAPATAN		85,739,862,000	219,506,674,207	401.37	117,016,527,359
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	195,824,149,000	193,774,768,586	99.05	185,892,176,729
Belanja Barang	B.2.2	546,046,993,000	456,121,518,392	83.53	711,938,177,892
Belanja Modal	B.2.3	693,749,248,000	434,010,890,059	62.56	94,177,852,050
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		1,435,620,390,000	1,083,907,177,037	71.55	992,008,206,671

Jakarta, 26 Januari 2026
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc
NIP. 197106191994031001

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2	125,066,911,108	68,221,487,743
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	9,684,074,100
Invenstasi Jangka Pendek-BLU	C.4	100,000,000,000	5,000,000,000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	11,444,218,611	5,605,882,227
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-9,739,323,477	-908,320,347
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.11		166,243,450
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.12	-	(831,217)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti R	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntuta	C.14	-	-
Persediaan	C.15	126,183,212,875	38,987,144,811
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		352,955,019,117	126,755,680,767
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	38,572,215,000	151,245,930,000
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	(7,154,978,387)	(44,841,144,544)
Jumlah Properti Investasi		31,417,236,613	106,404,785,456
ASET TETAP			
Tanah	C.23	3,792,279,477,365	3,756,767,517,642
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	952,688,528,934	922,411,425,057
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	1,416,541,076,707	1,313,698,875,867
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	552,929,175,841	550,975,996,989
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	4,584,886,569	4,649,857,349
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	333,300,821,067	23,005,851,182
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(1,460,023,361,455)	(1,338,599,441,391)
Aset Konsesi Jasa	C.35		
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36		
Jumlah Aset Tetap		5,592,300,605,028	5,232,910,082,695
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	16,122,540,748	4,657,350,748
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	198,690,000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	257,258,170,168	8,217,751,805
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	132,565,448,459	149,285,521,241
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(132,522,905,285)	(144,449,794,150)
Jumlah Aset Lainnya		273,423,254,090	17,909,519,644
JUMLAH ASET		6,250,096,114,848	5,483,980,068,562
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	195,474,819,881	20,923,948,650
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	1,270,076,385	134,081,644
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		196,744,896,266	21,058,030,294
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		196,744,896,266	21,058,030,294
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	6,053,351,218,582	5,462,922,038,268
JUMLAH EKUTAS		6,053,351,218,582	5,462,922,038,268
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6,250,096,114,848	5,483,980,068,562

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan BLU	D.1	199,041,847,271	92,579,845,639
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	14,886,152,632	20,030,179,618
Jumlah Pendapatan		213,927,999,903	112,610,025,257
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	193,609,947,024	185,887,444,571
Beban Persediaan	D.4	65,551,023,222	93,743,724,753
Beban Barang dan Jasa	D.5	178,530,533,688	189,602,200,306
Beban Pemeliharaan	D.6	29,800,413,256	39,531,632,420
Beban Perjalanan Dinas	D.7	34,864,136,633	91,348,214,338
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	98,878,524,590	334,615,617,843
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	106,345,192,136	109,487,602,990
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	112,135	24,302,442
Jumlah Beban		707,579,882,684	1,044,240,739,663
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(493,659,460,988)	(931,630,714,406)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(67,149,916,912)	(83,310,309,741)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	130,001,508,035	129,758,868,080
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		130,001,508,035	129,758,868,080
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(430,800,291,658)	(885,182,156,067)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(430,800,291,658)	(885,182,156,067)

Jakarta, 26 Januari 2026

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc
NIP. 197106191994031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	5,462,922,038,268	5,406,458,171,217
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(430,800,291,658)	(885,182,156,067)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(861,198,886)	2,746,630,973
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	(2,370,100)	1,617,942,116
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	(4,482,000)	154,864,732
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	(879,219,663)	614,458,132
Koreksi Lain-Lain	E.46	24,872,877	359,365,993
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1,022,090,670,858	938,899,392,145
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		590,429,180,314	56,463,867,051
EKUITAS AKHIR	E.6	6,053,351,218,582	5,462,922,038,268

Jakarta, 26 Januari 2026
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc
NIP. 197106191994031001

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Profil

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999

tanggal 1 Desember 1999.

Adapun Perubahan paradigma 2021-2024 :

- Kebijakan Pembangunan perikanan budidaya tidak hanya focus pada produksi.
- Perubahan paradigma menuju Perikanan Budidaya Berkelanjutan, Mandiri, Berdaya Saing, serta fokus pada komoditas bernilai ekonomis tinggi, antara lain vaname, lobster, kepiting, rumput laut, dan komoditas ikan air tawar.
- Perikanan budidaya harus menerapkan konsep Blue Economy, dengan menempatkan ‘Ekologi sebagai Panglima’ untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Terbentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya.

Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mangarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan.

Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia,

sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang.

Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai aktivitas pembangunan yang bersifat ekstrasi seperti industri, pemukiman, konservasi dan sebagainya.

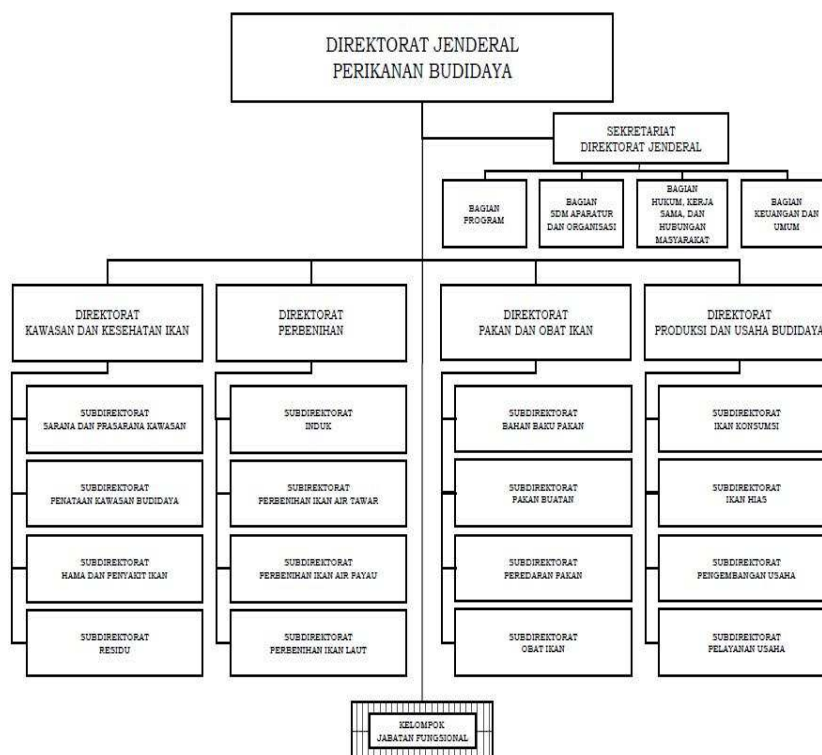
Setelah mengalami beberapa kali perubahan, susunan organisasi KKP khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.

Susunan organisasi Ditjen PB terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Ikan Air Laut; Direktorat Rumpuk Laut; Direktorat Ikan Air Tawar; Direktorat Ikan Air Payau; Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pada tahun 2020, tepatnya tanggal 25 September 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan struktur organisasi unit kerja eselon II di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat digambarkan sebagai berikut :



Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkat pembangunan perikanan budidaya adalah :

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
 - c. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di DJPB, yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPB.

Entitas berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berkomitmen dengan visi **“Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan”** untuk mewujudkan **“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong.”**

Tantangan Peningkatan Kebutuhan Protein Global



Isu Nasional dan Isu Teknis Perikanan Budi Daya



ISU NASIONAL PERIKANAN BUDI DAYA

- Penyediaan ikan hasil budi daya untuk konsumsi masyarakat dan ekspor.
- Hilirisasi Industri Rumput Laut
- Kesiapan pelaksanaan carbon storage bidang perikanan budi daya
- Regulasi dan perizinan usaha bidang perikanan budi daya

ISU TEKNIS PERIKANAN BUDI DAYA

- Pemilihan Lahan Budi Daya
- Induk Unggul dan Benih Bermutu
- Pakan dan Nutrisi
- Kesehatan Ikan dan Lingkungan
- Sumber Daya Air dan Energi
- Alat, Mesin, dan Mekanisasi Budi Daya
- Produksi dan Keamanan Pangan
- Pembiayaan dan Kelembagaan Budi Daya

Prospek 5 Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya



5 Komoditas Prioritas Perikanan Budi Daya				
Shrimp	Seaweed	Tilapia	Crabs	Lobster
Market Size (2025) USD 70.0 Billion	Market Size (2025) USD 9.4 Billion	Market Size (2025) USD 15.1 Billion	Market Size (2025) USD 937 Million	Market Size (2024) USD 8.3 Billion
Market Size (2035) USD 151.3 Billion	Market Size (2035) USD 23.9 Billion	Market Size (2035) USD 24.2 Billion	Market Size (2035) USD 1.5 Billion	Market Size (2033) USD 16.5 Billion
CAGR 8.0%	CAGR 9.8%	CAGR 4.8%	CAGR 4.7%	CAGR 8.0%
Market Share Indonesia (2022) 6.7%	Market Share Indonesia (2022) 16.4%	Market Share Indonesia (2022) 9.7%	Market Share Indonesia (2022) 1.9%	Market Share Indonesia (2022) 0.5%

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden (Asta Cita)



VISI

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

8 MISI ASTA CITA

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas; mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
- Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

DJPB mendukung di Asta Cita Nomor 2, 5, dan 6



Kebijakan Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045



Ekonomi Biru ke-3: Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan

KKP 2025   08



Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Strategi di Bidang Perikanan Budi Daya

KKP 2025   08

Peningkatan Produksi Ikan/Rumput Laut untuk Swasembada Pangan dan Ekspor	Penerapan Keamanan Pangan untuk Keberterimaan Ekspor bagi Industri Perikanan
 Modeling Budidaya Komoditas Unggulan (5 komoditas utama + inisiatif baru)	 Pembinaan Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 Budidaya Udang Terintegrasi	 Pembinaan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
 Revitalisasi Tambak Pantura	 Pembinaan Penerapan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 Kampung Perikanan Budi Daya	 Pembinaan Penerapan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 Revitalisasi Kluster Udang	 Pembinaan Penerapan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
 Revitalisasi Kluster Bandeng	 Pengujian Sampel Laboratorium Kesehatan Ikan
 Bantuan benih dan calon induk ikan	 Monitoring Residu dan Penyakit Ikan
 Bantuan bioflok	
 Bantuan mesin pakan mandiri	
 Bantuan Kebun bibit rumput laut	
 Bantuan bibit rumput laut	
 Bantuan pupuk untuk budidaya	
 Bantuan excavator	
 Bantuan sarpras ikan hias	
 Bantuan sarpras UPR/HSRT	
 Rehabilitasi saluran tambak (PITAP)	

Kebijakan Umum Perencanaan berdasarkan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus) antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja memperhatikan sasaran utama (outcome) kontribusi KKP terhadap prioritas nasional, yaitu Prioritas Ketahanan Pangan, Pembangunan Wilayah, pendidikan dan Kesehatan
2. Kegiatan dilakukan dengan Pendekatan Kebijakan Money Follow Program dan Kegiatan (Prioritas)

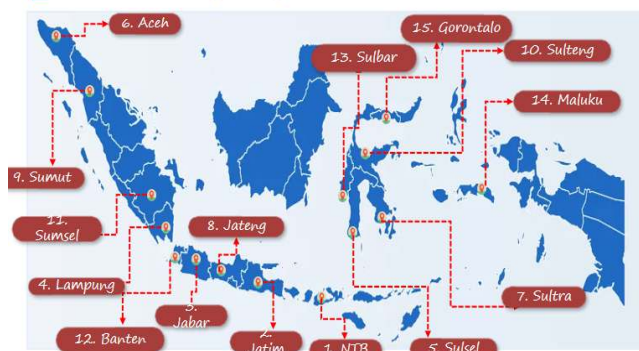
3. Setiap unit kerja Eselon I agar menyusun rencana kegiatan, hingga komponen kegiatan dan lokasinya secara lebih teliti, detail dan rinci agar sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan
4. Pengalokasian anggaran setiap detail kegiatan memperhatikan kaidah-kaidah efektivitas, efisiensi, suffisiensi, outcome oriented, transparan dan akuntabel
5. Unit kerja Eselon I mengefisienkan biaya operasional dan belanja aparatur, serta meningkatkan alokasi anggaran yang bermanfaat untuk masyarakat (stakeholders). Efisiensi dilakukan dengan pembatasan perjalanan dinas, pertemuan (rapat, seminar, lokakarya, peresmian kantor/proyek), dan biaya pendukung lainnya
6. Unit kerja Eselon I menetapkan satuan harga per unit (Unit cost) untuk setiap output/komponen/detail barang/jasa per lokasi kegiatan termasuk komponen biaya pembentuk yang tidak dapat dipisahkan dari output/komponen/detail barang/jasa
7. Melakukan Pengendalian Program dan kegiatan untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik
8. Integrasi perencanaan dan informasi Kinerja Anggaran, antara lain :
 - a. Unit Eselon I melakukan pengisian rencana dan Informasi Kinerja dalam sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), dengan memuat program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan detail Kegiatan sampai dengan level komponen, baik prioritas maupun reguler (non prioritas)
 - b. Dalam menentukan Indikator kinerja, harus memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Spesific: spesifik, tidak bisa diartikan lain;
 - 2) Measurable: memiliki ukuran yang jelas;
 - 3) Achievable: realistis dan dapat dicapai;
 - 4) Relevant: sesuai kebutuhan;
 - 5) Timeline: memiliki tahapan dan waktu yang jelas dalam pencapaiannya.
 - c. Setiap Komponen kegiatan yang disusun harus berkaitan dan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Sasaran KKP dan Indikator Kinerja Program

- d. Penyusunan komponen kegiatan agar memperhatikan :
- 1) Pelaku/penerima hasil kegiatan/bantuan;
 - 2) Unit cost dalam rangka pencapaian output;
 - 3) Kebutuhan masyarakat dan sara prasarana penunjang;
 - 4) Sumber daya pelaksana kegiatan;
 - 5) Akses pasar dan teknologi yang akan digunakan;
 - 6) Lokasi prioritas dan komoditas utama yang menjadi target.

PROGRAM PRIORITAS BUDIDAYA UDANG



Lokasi Sentra Budidaya Udang



Jenis Komoditas
Vaname, Windu

Program

- Modeling Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK)
- Integrated Shrimp Farming (ISF)
- Kluster Budidaya Udang
- Nucleus & Multiplication Center Induk Udang
- Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak (PITAP)
- Bantuan Benih, Induk, Excavator
- Bantuan Pupuk untuk Tambak
- Kampung Budidaya Udang (13 kab)

Target

2025: 1,25 juta ton
2029: 1,69 juta ton

PROGRAM PRIORITAS BUDIDAYA NILA



Lokasi Sentra Budidaya Nila Air Tawar



Jenis Komoditas
Nila Air Tawar, Nila Salin

Program

- Revitalisasi Tambak Pantura
- Pusat Produksi Induk Benih dan Ikan Air Tawar
- Bantuan Benih dan Induk
- Bantuan Mesin Pakan
- Bantuan Bioflok
- Bantuan Sarpras UPR
- Kampung Budidaya Nila (50 kab)

Target

2025: 1,55 juta ton
2029: 2,02 juta ton

PROGRAM PRIORITAS BUDIDAYA RUMPUT LAUT



Lokasi Sentra Budidaya Rumput Laut



Jenis Komoditas

Cottonii, Gracillaria, Spinosum

Program

- Modeling Budidaya Rumput Laut
- Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut
- Bantuan Bibit Rumput Laut
- Proyek Pinjaman LN - LAUTRA
- Kampung Budidaya Rumput Laut (41 kab)

Target

2025: 11,64 juta ton
2029: 14,15 juta ton

PROGRAM PRIORITAS BUDIDAYA KEPITING



Lokasi Sentra Budidaya Kepiting



Jenis Komoditas

Kepiting Bakau, Kepiting Soka, Rajungan

Program

- Modeling Budidaya Kepiting
- Modeling Budidaya Rajungan
- Bantuan Benih dan Induk
- Kampung Budidaya Kepiting (6 kab)

Target

2025: 22.000 ton
2029: 27.000 ton

PROGRAM PRIORITAS BUDIDAYA LOBSTER

Lokasi Sentra Budidaya Lobster



Jenis Komoditas

Lobster Pasir, Lobster Mutiara

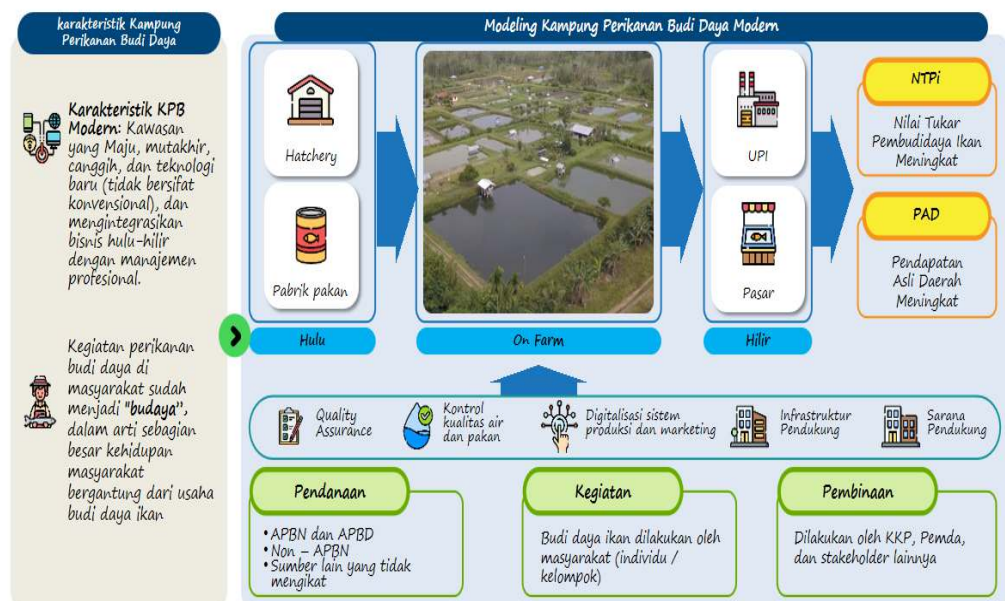
Program

- Modeling Budidaya Lobster
- Modeling Budidaya Kerang Coklat untuk Pakan Lobster
- Bantuan KJA Budidaya Laut
- Bantuan Benih dan Induk
- Kampung Budidaya Lobster (4 kab)

Target

2025: 1.000 ton
2029: 1.400 ton

Kampung Perikanan Budidaya



9. Rencana Belanja

a. Biaya Operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Operasional)

- 1) Unit eselon I menyediakan belanja pegawai termasuk uang makan (PNS), belanja oprasional, dan pemeliharaan perkantoran yang dihitung secara cermat sesuai kebutuhan riil selama 1(satu) tahun
- 2) Penyusunan biaya operasional dalam rangka mendapatkan

alokasi biaya operasional yang lebih realistis adalah sebagai berikut :

- a) Belanja gaji pegawai (termasuk uang makan, lembur, tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji dan tunjangan kinerja pegawai) pada pagu indikatif didasarkan data realisasi anggaran sampai bulan berjalan dan belum memasukkan asumsi kenaikan gaji pokok dan kenaikan tunjangan kinerja. Kenaikan hanya diperkenankan berbentuk acress maksimum 3,5%;
 - b) Belanja barang operasional perkantoran dan pemeliharaan aset dihitung berdasarkan data SIMAK BMN dan realisasi sampai bulan berjalan dengan memperhitungkan penambahan aset pada tahun berjalan dan kenaikan standar biaya.
- b. Biaya Non Operasional (Kegiatan Prioritas dan Pendukung)
- 1) Pengalokasian biaya non operasional harus memperhatikan :
 - a) 8 (sembilan) agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita)
 - b) Kegiatan prioritas yang merupakan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas serta arahan Menteri Kelautan dan Perikanan
 - c) Pencapaian target indikator Kinerja Sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - d) Kegiatan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang/Peraturan Pemerintah/peraturan Presiden/Keputusan Presiden /Instruksi Presiden
 - e) Kebutuhan untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multy years contract) yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, dan
 - f) Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang didanai dari Pinjaman dana/atau Hibah Luar Negeri (bila ada).
 - 2) Setiap keluaran yang akan dilaksanakan harus sudah memperhatikan kesiapan yang dipersyaratkan seperti TOR/KAK dan RAB usulan daerah, lahan yang clear and clean,

calon penerima manfaat, rencana kelembagaan pengelola, kesiapan biaya operasional, kesiapan dokumen pendukung teknis, bisnis plan, dokumen perizinan, kegiatan resiko, dokumen perizinan dan lain sebagainya.

- 3) Pengalokasian anggaran untuk satker Dekonsentrasi agar memperhatikan kinerja pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya serta capaian indikator kerjanya.

Sebagaimana 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Ditjen Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan

kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;

- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya, peningkatan mutu induk dan benih unggul serta perbenihan ikan lainnya, peningkatan produksi perikanan budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, ketersediaan pakan ikan, serta peningkatan usaha budidaya;
- 6) pelaksanaan administrasi Ditjen Perikanan Budidaya; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri atas:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Ikan Air Laut;
- 3) Direktorat Rumput Laut;
- 4) Direktorat Ikan Air Tawar;
- 5) Direktorat Ikan Air Payau;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Eselon II

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

a. Tugas Pokok

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan

organisasi di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- 3) pembinaan dan penyiapan bahan penataan organisasi dan tatalaksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 4) koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan serta penyiapan bahan pelaksanaan advokasi hukum; dan hubungan masyarakat, kerjasama, dan dokumentasi;
- 5) pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Direktorat Ikan Air Laut

a. Tugas Pokok

Direktorat Ikan Air Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana kawasan, penataan kawasan, hama dan penyakit ikan, residu dan laboratorium.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Ikan Air Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;

- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- 5) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penataan, pemanfaatan dan pemantauan sarana, prasarana dan lingkungan di kawasan pembudidayaan ikan yang memenuhi standar teknis, pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, pemantauan residu obat ikan dan kontaminan, serta kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

3. Direktorat Rumput Laut

a. Tugas Pokok

Direktorat Rumput Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, perbenihan ikan air payau dan perbenihan ikan laut.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Rumput Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar,

- air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
 - 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
 - 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; dan
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

4. Direktorat Ikan Air Tawar

a. Tugas Pokok

Direktorat Ikan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bahan baku pakan, pakan buatan, peredaran pakan dan obat ikan dan penerapan cara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Ikan Air Tawar menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan, dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, pendaftaran, peredaran dan pemantauan bahan baku pakan, pakan buatan, pakan alami dan obat ikan, surveilen mutu bahan baku pakan, pakan dan obat ikan, penerapancara pembuatan pakan ikan dan obat ikan yang baik, serta survei kepuasan masyarakat; dan
- 6) pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

5. Direktorat Ikan Air Payau

a. Tugas Pokok

Direktorat Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produksi ikan konsumsi, ikan hias, pengembangan usaha, dan pelayanan usaha

perikanan budidaya.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsi:

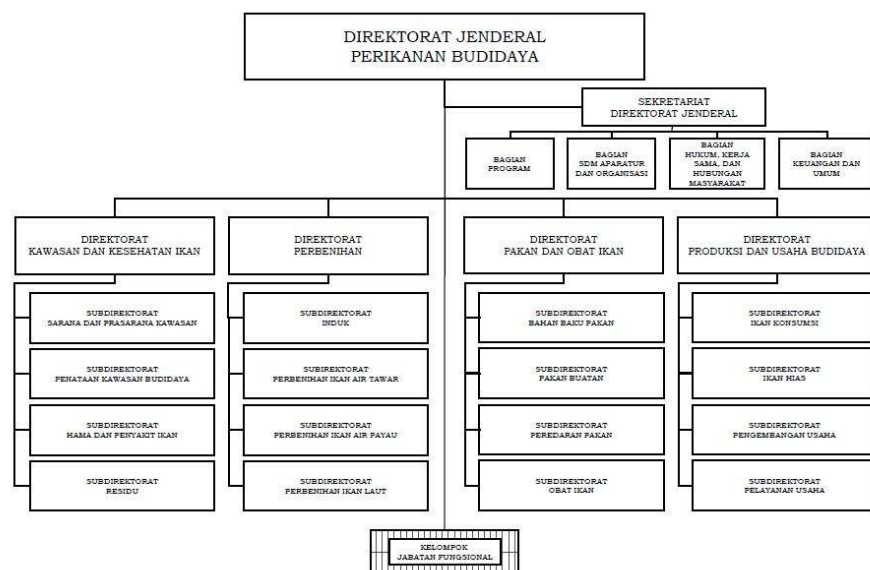
- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha pembudidayaan ikan;
- 5) penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penyediaan, penerapan teknologi pembesaran ikan konsumsi air tawar, payau, laut dan ikan hias, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ikan konsumsi dan ikan hias, penerapan cara budidaya ikan yang baik, kelembagaan, kemitraan, pembiayaan, investasi, perlindungan pembudidaya, perizinan dan rekomendasi usaha

- pembudidayaan ikan; dan
6) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut :



Adapun Program Terobosan KKP Berbasis Ekonomi Biru

1. Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut
2. Penangkapan Ikan terukur berbasis Kuota
3. Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat Secara Berkelanjutan
4. Pengelolaan dan Pengawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik di Laut

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan TA. 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahunan TA. 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang meliputi satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Pembinaan Akuntansi Instansi adalah 16 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-EI

No	Kode Es I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah
			K P	K D	D K	TP	Satker
1	04	Kantor Pusat	1	-	-	-	1
2	04	Kantor Daerah	-	15	-	-	15
3	04	Dekonsentrasi	-	-	-	-	-
Jumlah			1	15	0	0	16

Mulai penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, rekonsiliasi eksternal dilakukan melalui Aplikasi SAKTI yaitu aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Jenderal dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan TA. 2025 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan

(*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Kementerian/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain

Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(9) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

A.6 Penjelasan Umum Lainnya

1. Entitas Penyusun Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menggunakan pola pelaporan berjenjang yang disusun mulai tingkat satker. Jumlah satker yang melakukan penyusunan atas Laporan keuangan Lingkup DJPB dengan perbandingan antara tahun 2025 dan 2024 dapat digambarkan dalam rincian jumlah satker aktif adalah sebagai berikut.

Tabel A.3
Perbandingan Jumlah Satker Yang Melakukan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

No.	Eselon 1	2025					2024					+/-
		KP	KD	DK	TP	Σ	KP	KD	DK	TP	Σ	
1	DJPB	1	15	0		16	1	15	34		50	0
Σ		1	15	0		16	1	15	34		50	0

2. Rekening Koran

Pada pelaksanaan kegiatan satuan kerja dilingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, untuk menampung pencairan anggaran dan realisasi baik pendapatan maupun Belanja, menggunakan 21 rekening koran pada Bank Pemerintah.

3. Satuan Kerja yang menggunakan Anggaran PNBP

Selain satuan kerja merealisasikan Anggarannya melalui Rupiah Murni, terdapat juga satuan kerja yang menggunakan anggaran berasal dari Penggunaan Sebagian PNBP, yang merupakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang PNBP Lingkup DJPB antara lain:

Tabel A.5
Satker Yang Menggunakan Anggaran Berasal Dari Penggunaan
Sebagian PNB

Eselon I	Jumlah satker	Pagu	Realisasi
DJPB	15	11.210.206.000	2.717.843.640
Jumlah	15	11.210.206.000	2.717.843.640

*Informasi
Kepegawaian*

4. Informasi Kepegawaian

Data Pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berdasarkan simpeg pada saat disusunnya Laporan ini, Jumlah Pegawai DJPB dari Tahun 2019 – 2025 terdiri dari

Tabel A.6
Data Pegawai Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

NO	UNIT KERJA		TAHUN						
	PERMEN KP NO.23 TAHUN 2015	PERMEN KP NO.6 TAHUN 2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	DITJENKAN BUDIDAYA	DITJENKAN BUDIDAYA	1418	1424	1356	1313	1309	1195	1252
	TOTAL		1418	1424	1356	1313	1309	1195	1252

2	United Nations Industrial Organization	Global Quality and Standards Grant Agreement	On Going	Outcome 1: Quality Infrastructure a. Dibentuknya 2 (dua) LSPo IndoGAP yaitu BBPBPf Jepara, BBPBPf Sukabumi dan BBAP Takalar dan saat ini sedang dalam proses akreditasi, diharapkan proses akreditasi tersebut akan selesai pada bulan Juli 2021. b. Mengisi Kuisisioner Pre-Assessment Benchmark Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) c. Menghasilkan 5 (lima) Rekomendasi Kebijakan d. Mereski 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia Outcome 2: SMEs compliance to standards and regulations a. Pembuatan 15 (lima belas) Standar Operating Procedure (SOP) diantaranya untuk Udang, Vanamei, Patin, Bandeng dan Rumpul Laut. b. Terdapat 799 orang yang terdiri dari para akademisi, pemangku kebijakan, pelaku usaha dan tenaga ahli proyek berpartisipasi dan terlibat aktif di dalam diskusi, Focus Group Discussion dan pelatihan untuk menyusun ke 15 (lima belas) SOP tersebut. c. Telah dilaksanakan percontohan SOP di 39 (tiga puluh sembilan) Kelompok Pembudidayaan di 11 (sebelas) Kabupaten, dimana di setiap	Direktorat Produk dan Usaha, DJPB KKP	5 (lima) LSPo DJPB BBPBPf Jepara, BBPBPf Sukabumi, dan BBAP Takalar akan diakreditasi untuk dapat melakukan sertifikasi IndoGAP. Selain itu Soft launching IndoGAP akan dilakukan tahun ini dan diuji coba di salah satu komoditas (udang), setelah itu akan dilakukan pre-assessment IndoGAP untuk memastikan IndoGAP sesuai dengan standar global dan diakui secara internasional. Benchmarking dengan GSSI direncanakan akan dilakukan di tahun 2022.	Untuk aspek legalitas diperlukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan IndoGAP sehingga memastikan sistem jaminan mutu hasil perikanan budidaya Indonesia dan komitmen Indonesia terhadap pemenuhan persyaratan sertifikasi internasional.
3	Asian Development Bank	Loan 55020-INO: Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project	Preparation	Proyek ini akan membantu KKP dalam mengembangkan budidaya udang yang ramah lingkungan dan meningkatkan transparansi, keterbukaan dan proses pelaporan menuju peningkatan produktivitas, kualitas dan profitabilitas tambak udang rakyat di 7 provinsi. Proyek ini akan memberikan investasi terintegrasi yang menangani proses hulu, produksi, dan hilir melalui infrastruktur, dukungan untuk meningkatkan praktik pertanian dan sistem pasca panen, dan penguatan rantai nilai.	Direktorat KKI dan Direktorat Perbenihan	Usulan PHLN telah masuk ke dalam dokumen Green Book Bappenas dan pada awal Juli 2021 akan dilakukan kick off meeting dengan KKR untuk mempersiapkan tahapan kegiatan selanjutnya	Melakukan finding fact mission bersama ADB dan mempersiapkan loan negotiation

[illegible]

0	Zhejiang Ocean University, China	Cooperation on shrimp culture development	Implementing Arrangement (in)	Draft I.A sudah disampaikan kepada pihak Kementerian dan mendapat respon yang mendukung. Namun, perlu koordinasi dengan RRT sebagai payung hukum I.A.	Indonesia menyambut baik perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara kedua negara untuk meningkatkan produksi perikanan akuakultur. Perjanjian ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.	Kontribusi kerja sama DUFB dengan Zhejiang University, China: 1. Penemuan RRT dengan Universitas China pada bulan Oktober 2017, dimana pertemuan ini menghasilkan usulan untuk memelihara ikan di kolam budidaya udang. 2. Pertemuan dengan Konsul Jenderal China di Jakarta yang tanggal 10 Mei 2017 untuk mengkonfirmasi perjanjian kerjasama budidaya udang. 3. Tim budidaya udang telah dikirim dengan peralatan dan bibit udang dari pihak Zhejiang University. 4. Pihak China melalui Zhejiang University melakukan penelitian kolam budidaya udang dan mengkonfirmasi bahwa DUFB memiliki data informasi terkait budidaya udang dan usulan kerjasama yang akan dilakukan. 5. DUFB menerima email Zhejiang University dengan informasi awal tentang perjanjian kerjasama budidaya udang akan dilakukan pada Mei 2017. China telah mengirimkan informasi terkait budidaya udang dan usulan kerjasama yang akan dilakukan. 6. DUFB menerima email Zhejiang University dengan informasi awal tentang perjanjian kerjasama budidaya udang akan dilakukan pada Mei 2017. China telah mengirimkan informasi terkait budidaya udang dan usulan kerjasama yang akan dilakukan. 7. DUFB menerima email Zhejiang University dengan informasi awal tentang perjanjian kerjasama budidaya udang akan dilakukan pada Mei 2017. China telah mengirimkan informasi terkait budidaya udang dan usulan kerjasama yang akan dilakukan.
4	IRPISMA (Institut Indonesia Perikanan Perikanan)	Improving sustainable shrimp production and provision	Letter of Intent (in)	IRPISMA telah mengirimkan surat kepada DUFB dan Yozzan Kallimari pada tanggal 23 Desember 2018.	Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan akses ke teknologi budidaya udang, pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan produksi udang, meningkatkan sistem manajemen budidaya udang, dan meningkatkan hasil budidaya udang.	Sejak ditandatangani perjanjian ini telah ada tindak lanjut kerja sama apapun.
5	Peraturan Emirat Arab (P.A.)	Kerja sama terkait kegiatan dan penelitian	Plan of Action (PoA) for the implementation of Action of Marine Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Climate Change and Environment of the United Arab Emirates	PoA telah ditandatangani secara resmi oleh DUFB dan Yozzan Kallimari pada tanggal 23 Desember 2018 di Abu Dhabi.	Dalam rangka kerja sama kelautan dan perikanan RRT - RI, pada tanggal 29 Desember 2018 telah ditandatangani Joint Declaration of Intent (JDI) antara DUFB dan Yozzan Kallimari.	Belum ada tindak lanjut kegiatan pokok penandatanganan PoA hingga saat ini. Belum ada usulan spesifik dari RI kepada DUFB terkait kegiatan kerja sama yang akan dilakukan.
10	United States of America/Oceanic Institute of Hawaii	Development of National Shrimp Breeding Program	1. J. Letter of Intent (in), dan 2. J. MOU Di DUFB	1. J. Letter of Intent (in), dan 2. J. MOU Di DUFB telah ditandatangani oleh DUFB dan Oceanic Institute of Hawaii, Pacific University di Hawaii pada 20 Desember 2018.	1. J. Letter of Intent (in), dan 2. J. MOU Di DUFB telah ditandatangani oleh DUFB dan Oceanic Institute of Hawaii, Pacific University di Hawaii pada 20 Desember 2018.	Hasil kerjasama ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas untuk kegiatan budidaya udang di Indonesia. Untuk memastikan keberhasilan program ini, DUFB akan melakukan penelitian dan pengembangan budidaya udang di Indonesia.
11	Mezambik	Kerja sama pengembangan penelitian budidaya ikan di Mezambik, khususnya untuk komoditas ikan air tawar dan	1. J. MOU kerja sama kelautan perikanan Indonesia - Mezambik di 11 Juli 2018. 2. J. MOU kerja sama kelautan perikanan Indonesia - Mezambik di 29 Oktober 2018.	1. J. MOU kerja sama kelautan perikanan Indonesia - Mezambik di 11 Juli 2018. 2. J. MOU kerja sama kelautan perikanan Indonesia - Mezambik di 29 Oktober 2018.	1. J. MOU kerja sama kelautan perikanan Indonesia - Mezambik di 11 Juli 2018. 2. J. MOU kerja sama kelautan perikanan Indonesia - Mezambik di 29 Oktober 2018.	Perencanaan kerja sama yang dilakukan dalam PoA kepada DUFB adalah untuk melakukan penelitian dan pengembangan budidaya ikan di Mezambik, khususnya untuk komoditas ikan air tawar dan.
12	Selandia Baru	Komitmen komprehensif RI Selandia Baru	Plan of Action (PoA) on Comprehensive Partnership RI - New Zealand 2018-2025	PoA ditandatangani oleh Menteri RI dan Menteri New Zealand secara resmi di Jakarta pada 29 Juli 2018.	PoA ditandatangani oleh Menteri RI dan Menteri New Zealand secara resmi di Jakarta pada 29 Juli 2018.	Belum ada implementasi kegiatan ini setelah pelaksanaan pertemuan pada Oktober 2018 dan belum ada kesepakatan dari pemerintah.
13	Asosiasi Perikanan Global (OCC)	Penyempurnaan sistem pengelolaan budidaya ikan air tawar (ISPS)	Perjanjian	Perjanjian ini akan ditandatangani oleh DUFB dan Asosiasi Perikanan Global (OCC) pada 2018.	Perjanjian ini akan ditandatangani oleh DUFB dan Asosiasi Perikanan Global (OCC) pada 2018.	Hasil kerjasama ini akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas untuk kegiatan budidaya ikan air tawar di Indonesia.

Sistem Informasi yang digunakan

7. Sistem Informasi yang dipergunakan

Sistem Informasi yang dipergunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

- Aplikasi SAKTI, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan. Penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah. aplikasi SAKTI ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Aplikasi SAKTI memiliki 8 Modul yaitu Modul Anggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Modul Pembayaran, Modul GLP, Modul Aset Tetap, Modul Persediaan, dan Modul Piutang. Aplikasi dipergunakan mulai tahun 2022. Aplikasi ini Dibuat dan

- dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- b. Aplikasi SIRUP, aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (*Web based*) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. Aplikasi SPSE, aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) untuk digunakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh K/L/D/I. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya;
 - d. SPAN, sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses akuntabel dan transparan. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - e. Simponi, aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBPN dan penerimaan nonanggaran. Keberadaan aplikasi SIMPONI ini ditujukan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Bayar/Wajib Setor guna membayar atau menyetor PNBPN dan penerimaan non anggaran. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 - f. SIMAN, aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses

oleh Pengelola dan Pengguna. Aplikasi ini Dibuat dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Perubahan Manajerial

8. Perubahan Manajerial

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh DJPB

9. Aplikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh DJPB

Nama Eselon I	Nama Aplikasi	Penjelasan Fungsi/Manfaat Dari Aplikasi	Pemilik Aplikasi
DJPB	SEMILIR	Pemetaan Potensi dan Sarana/Prasarana Budidaya Perikanan [Pendataan sarana produksi: excavator, saluran tambak, balai-balai benih, potensi lahan]	DJPB
	SIBATIK	Aplikasi berbasis web untuk melakukan pelayanan obat ikan [Serupa dengan SEPEKAN. SIBATIK adalah Sistem Informasi Obat Ikan. SIBATIK sudah running, ada di bagian pelayanan publik. Apabila akan diintegrasikan, harus sangat hati-hati karena bisa sangat mengganggu pelayanan publik]	DJPB
	SEKETIKA	Permohonan surat keterangan teknis impor bahan baku pakan ikan [Catatan: Masih berjalan, namun nanti akan digantikan dengan SRIKANDI. Termasuk pelayanan publik satu pintu (ada loket). Integrasi harus dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut pelayanan publik]	Pusdatin
	AKUBISA	Aplikasi pengajuan surat izin impor ikan hidup, Surat Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal(RPIPM) dan SIUP	DJPB

Kebijakan Manajemen bidang Keuangan

10. Kebijakan Manajemen bidang Keuangan

- Melakukan reviu terhadap DIPA 2025 yang sudah disahkan dan hal-hal yang diperlukan penyesuaian agar segera dilakukan penyesuaian/revisi anggaran.
- Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program/kegiatan meliputi:

- a. Penetapan Petunjuk Operasional Kegiatan.
 - b. Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara.
- Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa yang mencakup:
 - a. Penetapan Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan atau kelompok kerja pengadaan.
 - b. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani sesuai dengan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - c. Penandatanganan kontrak ke KPPN paling lambat lima hari kerja setelah kontrak ditandatangani.
 - Melakukan percepatan persiapan penyaluran bantuan pemerintah yang mencakup: penetapan pedoman umum dan Petunjuk Teknis, pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima/kelompok serta penetapan surat keputusan penerima.
 - Kebijakan Pelaksanaan Anggaran KKP, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang mencakup:
 - a. Proses penyusunan anggaran tahun 2025 telah memperhatikan urutan prioritas diantaranya kebutuhan anggaran operasional yang sifatnya mendasar, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen RPJM 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 khususnya kegiatan yang termasuk *Major Project*, kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multiyears*) dan penyediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan.
 - Alokasi anggaran KKP juga difokuskan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan, salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana arahan Presiden. Tak hanya budidaya, pengelolaan perikanan tangkap, nilai tambah di

sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengendalian mutu dan perkarantinaaan serta pengawasan keuangan dan dukungan manajemen juga akan menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025.

- Alokasi anggaran mengutamakan kegiatan prioritas (*money follow program* prioritas). Pengalokasian anggaran tidak lagi berbasis pada pelaksanaan tugas dan fungsi namun berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden.
- Melibatkan peran aktif bagian yang menangani Monitoring, Evaluasi dan Pengelola Keuangan seluruh Unit Eselon I Lingkup KKP untuk membantu perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta perkembangan realisasi anggaran belanja.
- Dukungan dari Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal dalam mendorong terjadinya percepatan pelaksanaan anggaran belanja KKP.

**Penjelasan
lainnya**

11. Penjelasan Lainnya

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK163 Tahun 2023 tentang penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan Umum. Selanjutnya ketiga Balai ini telah menjadi Badan Layanan Umum.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,589,862,000	50,589,862,000
Jumlah Pendapatan	50,589,862,000	50,589,862,000
Belanja		
Belanja Pegawai	199,890,284,000	195,625,149,000
Belanja Barang	479,095,368,000	546,046,993,000
Belanja Modal	243,904,002,000	693,749,248,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	922,889,654,000	1,435,421,390,000

alisasi Pendapatan
Rp219,506,674,207

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp219,506,674,207 atau mencapai 433.89 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp50,589,862,000. Pendapatan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp219,506,674,207. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi mengalami kenailan dikarenakan terdapat revisi akun untuk rumah dinas yang semua melalui akun 425131 menjadi akun 425151. Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan Bangunan juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu dikarena perpanjangan sewa oleh pihak ketiga hal ini terdapat di BPKIL Serang dan BBP BAT Sukabumi. Pendapatan Denda lainnya merupakan Kenaikan terbesar pada pendapatan kerjasama BLU dan terdapat di BPBAP Situbondo berupa Pendapatan Hasil Kerjasama Penyediaan Benih Bening Lobster (BBL) untuk Pengiriman ke Luar Negeri maupun untuk Budidaya di dalam Negeri. Berikut rincian pendapatan Penyediaan Benih Bening Lobster per masing Joint Venture yang bekerja sama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		n/
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,589,862,000	219,506,674,207	433.89
Juml	50,589,862,000	219,506,674,207	433.89

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 433.89 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	219,506,674,207	117,016,527,359	433.89
Juml	219,506,074,207	117,016,527,359	433.89

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

#VALUE!

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

*Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp219,506,674,207*

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp219,506,674,207 dan Rp117,016,527,359. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 433.89 dari TA 2024 Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tuisi mengalami kenaikan dikarenakan terdapat revisi akun untuk rumah dinas pegawai.

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	219,506,674,207	117,016,527,359	433.89
Jumlah	203,051,894,344	117,017,227,359	433.89

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

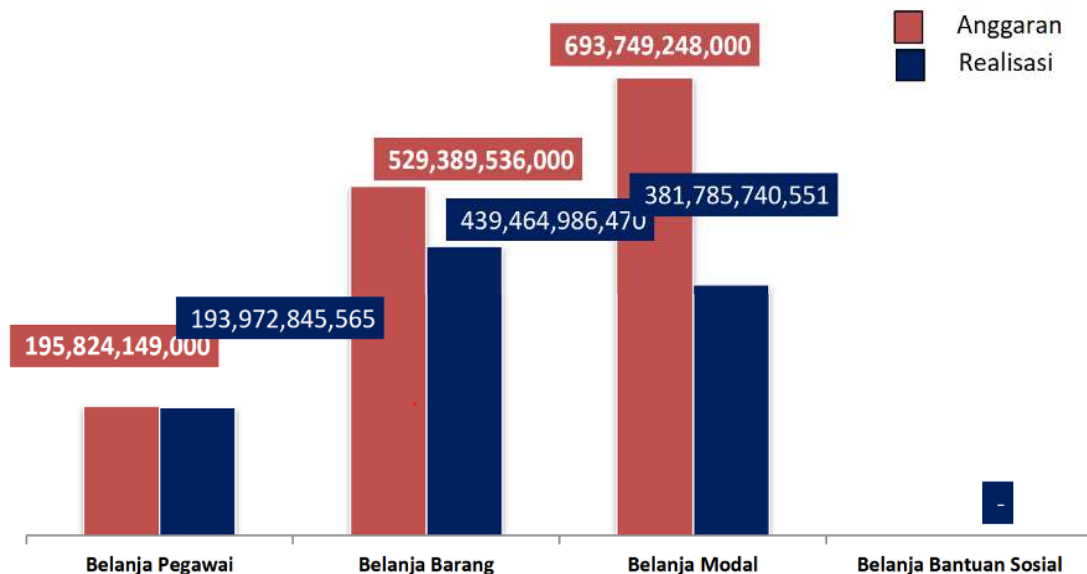
URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan	582,270,000	344,968,750	68.79
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	705,655,500	1,017,159,500	(30.26)
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	158,828,863,000	66,073,273,000	140.38
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6,338,656,931	564,679,971	1,022.51
Pendapatan Lain-lain BLU	32,126,287,117	23,702,944,699	(33.48)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	78,553,533	179,474,390	(56.23)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	546,515,000	491,473,383	(9.15)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	61,519,640	-	-
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	9,090,940,733	13,4112,266,129	(32.22)

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	916,626,100	2,014,396,347	(54.50)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	1,760,616,989	743,111,147	136.93
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tuisi	1,714,677,074	707,176,924	142.47
Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	2,973,966,733	3,706,286,800	(19.76)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	16,965,000	34,500,000	(50.83)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	404,344,485	1,249,447,622	(67.64)
Pendapatan Denda lainnya	407,092	-	-
Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	25,534,387	392,446,010	(93.49)
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	3,006,986,908		
Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu	327,288,718		
Jumlah	219,506,674,207	117,016,527,359	54.22

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp1,083,907,177,037 atau 75.51 % dari anggaran belanja sebesar Rp.1,435,421,390,000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025



U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	195,625,149,000	193,774,768,586	99.05
Belanja Barang	546,046,993,000	456,121,518,392	83.53
Belanja Modal	693,749,248,000	434,010,890,059	62.56
Belanja Modal BLU	-	-	-
Jumlah	1,435,421,390,000	1,083,907,177,037	75.51

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Komposisi Anggaran dan ReRealisasi Tahun
2025*

Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 2.42% Penurunan karena adanya efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas dan belanja diserahkan masyarakat yang merupakan belanja untuk menunjang program prioritas ekonomi nasional (PN) Kementerian Kelautan Perikanan berupa bantuan benih, paket-paket bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan UPR, paket budidaya ikan sistem bioflok dan belanja modal berupa kenaikan belanja peralatan dan mesin berupa spare part dan mesin pengolahan pakan mandiri, peralatan mesin pendukung produksi dan peratan laboratorium dan peralatan perkantoran. Kenaikan belanja gedung bangunan berupa rehabilitasi gedung bangunan kantor dan tambak.. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	193,774,768,586	185,892,176,729	4.35
Belanja Barang	456,121,518,392	711,938,177,892	(38.27)
Belanja Modal	434,010,890,059	94,177,852,050	308.79
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1,083,907,177,037	992,008,206,671	2.42

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp193,774,768,586

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp193,774,768,586 dan Rp185,892,176,729. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 4.35 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena ada penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan kenaikan gaji berkala pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	60,818,382,557	61,965,358,000	(1.81)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	781,059	883,949	(10.72)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,672,299,458	4,774,433,080	(2.14)
Belanja Tunj. Anak PNS	1,439,402,479	1,483,438,206	(2.96)
Belanja Tunj. Struktural PNS	737,455,000	784,210,000	(5.96)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,357,524,000	4,322,801,000	(45.32)
Belanja Tunj. PPh PNS	573,474,268	613,214,647	(6.48)
Belanja Tunj. Beras PNS	3,243,788,400	3,356,405,510	(3.35)
Belanja Uang Makan PNS	8,614,821,000	7,975,680,000	10.50
Belanja Tunjangan Umum PNS	918,445,000	1,019,390,000	(9.72)
Belanja Uang Lembur	692,876,300	404,852,000	71.18
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	86,049,339,109	84,810,105,477	1.47
Belanja Uang Lembur PPPK	146,274,600	38,166,000	283.26
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PPPK	11,157,216,934	6,512,386,226	71.33
Belanja Gaji Pokok PPPK	8,669,056,587	5,653,418,900	53.41
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	177,544	109,108	63.39
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	515,528,647	301,029,970	71.38
Belanja Tunjangan Anak PPPK	142,413,103	79,982,574	78.15
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	277,780,000	208,253,720	33.39
Belanja Tunjangan Beras PPPK	535,159,660	313,286,920	70.89
Belanja Uang Makan PPPK	1,783,377,000	928,844,000	92.00
Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	353,040,881	426,970,924	(17.32)
Belanja Tunjangan Umum PPPK	76,155,000	-	-
Belanja Tunjangan Lauk Pauk	-	56,176,000	(100.00)
Jumlah Belanja kotor	194,017,542,669	186,029,398,211	4.29
Pengembalian Belanja Pegawai	44,697,104	137,221,482	(67.43)
Jumlah Belanja	193,972,845,565	185,892,176,729	4.35

Realisasi Belanja
Barang
Rp456,121,518,392

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp456,121,518,392 dan Rp711,938,177,892. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 38.27% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Efisiensi anggaran menyebabkan penurunan signifikan pada belanja perjalanan dinas dan belanja bantuan pemerintah.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	17,924,038,122	44,507,303,303	(59.73)
Belanja Barang Non Operasional	24,516,163,111	44,227,685,595	(44.48)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	73,329,462,718	77,643,326,768	(5.56)
Belanja Jasa	124,909,926,284	101,411,761,522	23.89
Belanja Pemeliharaan	25,397,209,665	37,886,420,103	(32.96)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	33,001,209,980	90,002,552,478	(62.88)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	740,912,110	2,661,519,392	(68.93)
Belanja Barang BLU	45,197,747,848	248,836,270,881	(55.37)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	111,065,157,719		
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	39,690,835		
Jumlah Belanja Kotor	457,582,472,445	714,402,877,992	(38.28)
Pengembalian Belanja	1,460,954,053	2,464,700,100	(40.72)
Jumlah Belanja	456,121,518,392	711,938,177,892	(38.27)

Realisasi Belanja Modal
Rp434,010,890,059

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp434,010,890,059 dan Rp94,177,852,050. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 308.79% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Kenaikan Belanja Modal dikarenakan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	252,133,501	(100.00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,087,853,917	27,306,446,430	101.74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	363,213,015,602	42,431,339,067	638.16
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,104,114,532	23,632,868,762	(91.10)
Belanja Modal Lainnya	11,380,756,500	94,580,000	11,932.94
Belanja Modal BLU	2,225,149,508	460,484,290	
Jumlah Belanja Kotor	434,010,890,059	94,500,400,660	307.38
Pengembalian Belanja	-	322,548,610	(100.00)
Jumlah Belanja	434,010,890,059	94,177,852,050	308.79

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp252,133,501. Realisasi tersebut pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100.00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	252,133,501	(100.00)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	252,133,501	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	252,133,501	(100.00)

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp55,087,853,917

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55,087,853,917 dan Rp27,306,446,430, mengalami kenaikan sebesar 101.85 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Kenaikan terjadi karena Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendapatkan Program Prioritas ketahanan pangan sehingga terdapat

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,087,853,917	27,306,446,430	101.74
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	55,087,853,917	27,306,446,430	101.74
Pengembalian	-	14,569,271	(100.00)
Jumlah Belanja	55,087,853,917	27,291,877,159	101.85

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp363,213,015,602

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp363,213,015,602 dan Rp42,431,339,067 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 639.66% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Kenaikan belanja modal gedung dan bangunan dikarenakan program prioritas ketahanan pangan sehingga banyak pembangunan tambak-tambak maupun rehabilitas tambak..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115,421,378,153	36,902,035,350	77.28
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	247,791,637,449	5,529,303,717	4,381.43
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	363,213,015,602	42,431,339,067	638.16
Pengembalian Belanja	-	85,850,826	(100.00)
Jumlah Belanja	363,213,015,602	42,345,488,241	639.66

*Realisasi Belanja Modal,
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp2,104,114,532*

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,104,114,532 dan Rp23,632,868,762, mengalami penurunan sebesar 86.09 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Pembangunan jalan jembatan dan irigasi salahsatunya terdapat di BBP BAT Sukabumi yaitu Rehabilitasi Pusat Produksi Benih dan induk di mesuji

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	2,001,299,424	(100.00)
Belanja Modal Irigasi	-	10,908,967,755	(100.00)
Belanja Modal Jaringan	-	2,437,126,466	(100.00)
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	2,104,114,532	8,204,528,567	-
Jumlah Belanja Kotor	2,104,114,532	15,347,393,645	(86.29)
Pengembalian Belanja	-	222,128,513	(100.00)
Jumlah Belanja	2,104,114,532	15,125,265,132	(86.09)

*Realisasi Belanja Modal
Lainnya
Rp11,380,756,500*

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11,380,756,500 dan Rp94,580,000, mengalami kenaikan sebesar 11,932.94 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Kenaikan Belanja Modalnya terdapat di Setditjen Perikanan Budi Daya berupa Pembangunan campaign Media Management.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	11,380,756,500	94,580,000	11,932.94
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	11,380,756,500	94,580,000	11,932.94
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	11,380,756,500	94,580,000	11,932.94

*Realisasi Belanja Modal
BLU Rp2,225,149,508*

B.2.4 Belanja Modal BLU

Realisasi Belanja Modal BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2,225,149,508 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2,225,149,508	460,484,290	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2,225,149,508	460,484,290	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2,225,149,508	460,484,290	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Semua sisa kas GUP di bendahara pengeluaran telah disetorkan ke kas negara.

Kas pada Badan
Layanan Umum
Rp125,066,911,108

C.2 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.125,066,911,108 dan Rp.68,221,487,743. Kas pada Badan Layanan Umum Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas pada Badan Layanan Umum Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas dan Bank-BLU	125,066,911,108	68,221,487,743
-	-	-
Jumlah	125,066,911,108	68,221,487,743

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Terdapat Kas dan bank BLU karena belanja dan pendapatan yang sudah disahkan.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9,684,074,100. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	9,684,074,100
-	-	-
Jumlah	-	9,684,074,100

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Semua sisa kas lainnya di bendahara pengeluaran telah disetorkan ke kas negara.

Investasi Jangka
Pendek-BLU
Rp100,000,000,000

C.4 Investasi Jangka Pendek-BLU

Saldo Investasi Jangka Pendek-BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp100,000,000,000 dan Rp5,000,000,000. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU disajikan sebagai berikut

Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan	100,000,000,000.00	5,000,000,000.00
-	-	-
Jumlah	100,000,000,000	5,000,000,000

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Terdapat Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya di BPBAP Situbondo.

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid) Rp0

C.5 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

-

Pendapatan yang Masih
Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

-

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Piutang Bukan Pajak
Rp11,444,218,611

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp11,444,218,611 dan Rp5,605,882,227. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	2,492,706,034	5,521,882,227
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,930,041,658	84,000,000
Jumlah	11,444,218,611	5,605,882,227

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp9,739,323,477

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9,739,323,477 dan Rp908,320,347. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	1,691,991,528	0.5%	8,459,958
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	9,739,323,477	100%	9,739,323,477
Jumlah	11,444,218,611		9,739,323,477

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan Rp126,183,212,875

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp126,183,212,875 dan Rp38,987,144,811. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	40,623,638,997	10,324,037,170
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	11,089,686,917	12,297,178,010
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	59,685,994,122	1,025,355,500
Bahan Baku	2,777,304,513	3,985,129,192
Persediaan Lainnya	11,308,892,997	5,694,904,804
Jumlah	126,183,212,875	38,987,144,811

Persediaan tersebut di atas dalam

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang
lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Properti Investasi
Rp31,417,236,613

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp31,417,236,613 dan Rp151,245,930,000. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Properti Investasi	31,417,236,613	151,245,930,000
-	-	-
Jumlah	31,417,236,613	151,245,930,000

Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi
Rp(7,154,978,387)

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp-7,154,978,387 dan Rp-44,841,144,544. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah
Rp3,792,279,477,365

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3,792,279,477,365 dan Rp3,756,767,517,642. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	3,756,767,517,642
Mutasi tambah :	
Saldo Awal	5,674,758,000
Transfer Masuk	1,305,598,000
Hibah (Masuk)	1,305,598,000
Perolehan Lainnya	56,364,886,073
Pengurangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	1,305,598,000
Hibah (Keluar)	4,753,570,000
Koreksi Pencatatan	27,087,737,650
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	3,792,279,477,365

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	260 m2	Jl. Asmud Lubis Sukabumi	1,732,102,337
2	1.050 m2	Jl. Kabandungan Sukabumi	6,190,958,702
3	1.415 m2	Jl. Raya Cisolok Plb. Ratu	2,398,216,432
4	256.000 m2	Jl. Selabintana 37 Sukabumi	1,600,352,857,921
5	1.690 m2	Jl. Gunung Jaya Cisaat	2,960,599,012
6	6.130 m2	Jl. Raya Cisolok Plb. Ratu	10,389,446,451
7	3.995 m2	Jl. Raya Cisolok Plb. Ratu	6,770,936,146
8	41545 M2	Desa pananjung Kec. Pangandaran	1,121,715,000
Jumlah			1,631,916,832,000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

*Tanah Belum Diregister
Rp0*

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan Mesin
Rp952,688,528,934*

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp952,688,528,934 dan Rp922,411,425,057. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	922,411,425,057
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	605,993,040
Pembelian	44,755,979,604
Transfer Masuk	6,594,840,029
Reklasifikasi Masuk	15,485,926,436
Perolehan Lainnya	4,386,813,136
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	23,700,000
Transfer Keluar	6,594,840,029
Hibah (Keluar)	11,436,889,940
Reklasifikasi Keluar	15,485,926,436
Koreksi Pencatatan	401,788,000
Saldo per 31 Desember 2025	952,688,528,934
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(807,462,885,109)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	152,834,947,788

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

a.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp1,416,585,433,707

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1,416,585,433,707 dan Rp1,313,698,875,867. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	1,313,698,875,867
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	703,931,180
Perolehan Lainnya	463,057,000
Reklasifikasi PI ke BMN	112,718,072,000
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	10,952,000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	537,551,952
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	13,774,644
Hibah (Keluar)	2,215,623,200
Reklasifikasi Keluar	703,931,180
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	-
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	8,723,677,268
Saldo per 31 Desember 2025	1,416,475,433,707
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(347,406,648,151)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	1,069,068,785,556

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- 0

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp552,929,175,841

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.552,929,175,841 dan Rp.550,975,996,989. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	550,975,996,989
Mutasi tambah:	
Pembelian	1,242,990,832
Perolehan Lainnya	78,127,800
Penyelesaian Pembangunan Langsung	779,144,700
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	569,656,682
	-
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	20,591,162
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	696,150,000
	-
	-
	-
Saldo per	552,929,175,841
Akumulasi Penyusutan s.d.	(304,887,795,342)
Nilai Buku per	248,041,380,499

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- 0

- 0

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- 0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp4,584,886,569

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.4,584,886,569 dan Rp.4,649,857,349. Aset tetap tersebut Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai berupa berupa bahan perpustakaan tercetak, alat bercorak kebudayaan dan biota perairan lainnya..

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	4,649,857,349
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Dengan KDP Aset Tetap Renovasi	81,979,000
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	146,949,780
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	4,584,886,569
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(279,034,045)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4,305,852,524

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp333,300,821,067

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.333,300,821,067 dan Rp.23,005,851,182. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	23,005,851,182
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	54,510,254,000
Perolehan Lainnya KDP	110,000,000
Mutasi Kurang:	
Penghapusan/ Penghentian KDP	84,617,500
Uraian jenis transaksi tidak ada	21,646,172,950
Koreksi Pencatatan KDP	3,443,548,282
Koreksi Nilai KDP berkurang	33,450,000
Saldo per 31 Desember 2025	333,300,821,067

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp1,460,023,361,455

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp1,460,023,361,455 dan Rp1,338,599,441,391. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	952,688,528,934	(807,462,885,109)	145,225,643,825
2	Gedung dan Bangunan	1,416,585,433,707	(347,406,648,151)	1,069,178,785,556
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	552,929,175,841	(304,887,795,342)	248,041,380,499
4	Aset Tetap Lainnya	4,584,886,569	(279,034,045)	4,305,852,524
Akumulasi Penyusutan		2,926,788,025,051	(1,460,036,362,647)	1,466,751,662,404

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi Jasa Rp0

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp0

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud
Rp16,122,540,748

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp16,122,540,748 dan Rp4,657,350,748. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berupa Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	4,657,350,748
Mutasi tambah:	
Pembelian	1,912,259,998
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	198,690,000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	198,690,000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	1,912,259,998
Internal transfer keluar	325,780,000
	-
	-
Internal transfer keluar	325,780,000
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	16,122,540,748
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(7,210,013,478)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	8,785,437,270

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

-
-

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.198,690,000. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	198,690,000
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	198,690,000
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	0

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp257,258,170,168

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp257,258,170,168 dan Rp8,217,751,805. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	257,258,170,168	(8,217,751,805)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	257,258,170,168	(8,217,751,805)

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga berupa RPATA tahun 2025

Aset Lain-lain
Rp132,565,448,459

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp132,565,448,459 dan Rp149,285,521,241. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	149,285,521,241
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	17,614,269,911
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	5,456,244,000
internal transfer masuk	58,822,500
Penghentian Sementara KDP	1,272,956,450
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	347,390,900
Penghapusan	274,160
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	930,313,250
Penggunaan Kembali KDP	1,228,279,250
Saldo per 31 Desember 2025	132,565,448,459
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(125,312,891,807)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	45,868,664,735

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-

Mutasi Kurang

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya
132,522,905,285

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp132,522,905,285 dan Rp144,449,794,150. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	16,122,540,748	(7,210,013,478)	8,912,527,270
Aset Lain-lain	132,565,448,459	(125,312,891,807)	7,252,556,652
-	-	-	-
Total	148,687,989,207	(132,522,905,285)	16,165,083,922

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp195,474,819,881

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp195,474,819,881 dan Rp20,923,948,650. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	54,588,000	228,879,584
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	2,293,285,176	2,793,243,161
Beban Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	193,126,946,705	8,217,751,805
	-	-
Total	195,474,819,881	11,239,874,550

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan beban yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga tetapi jasa dan pekerjaannya sudah di pakai pada bulan Desember 2025 berupa kekurangan pembayaran uang makan pegawai, tagihan listrik, internet dan telepon serta adanya tunggakan belanja HDPE BINS di Direktorat Ikan Air Tawar.

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp1,270,076,385

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1,270,076,385 dan Rp134,081,644. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	1,209,846,385	134,081,644
Pendapatan Diterima di Muka-BLU	60,230,000	-
	-	-
Total	1,270,076,385	134,081,644

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

berupa sewa sebagian lahan/bangunan sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara untuk koperasi senilai Rp.15.000.000,- sesuai dengan perjanjian sewa No. B.2918/BBPBAT/TU.450/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dan untuk tempat pendidikan (TK) senilai Rp.5.354.600,- sesuai dengan perjanjian sewa No.B.2919/BBPBAT/TU.450/IX/2022 tanggal 29 September 2022 dengan masa sewa selama 3 (tiga) Tahun, sampai dengan tahun 2023 sudah diserahkan jasa pendapatan selama 15 bulan. Dan perpanjangan sewa tanah dan bangunan Hatchery di BPKIL Serang.

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) yang digunakan untuk membayar operasional baik belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

-

Ekuitas
Rp6,053,351,281,582

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6,053,351,218,582. dan Rp5,462,922,038,268. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan BLU

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp199,041,847,271 dan Rp92,579,845,639. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Jasa Layanan Umum berupa pendapatan pengujian sampel laboratorium. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU berupa Pendapatan Hasil Kerjasama Penyediaan Benih Bening Lobster (BBL) untuk Pengiriman ke Luar Negeri maupun untuk Budidaya di dalam Negeri. Berikut rincian pendapatan Penyediaan Benih Bening Lobster per masing Joint Venture yang bekerja sama dengan Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Pendapatan BLU lainnya berupa penjualan perikanan, sewa gedung.. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan BLU	199,041,847,271	92,579,845,639	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	199,041,847,271	92,579,845,639	-

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp14,886,152,632 dan Rp20,030,179,618. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 25.68. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berupa :

A. Pendapatan penerimaan umum yang terdiri dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

B. Pendapatan penerimaan fungsional yang terdiri dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya berupa hasil penjualan ikan berupa induk unggul dan benih berkualitas, pendapatan jasa pengujian laboratorium berupa jasa analisa sampel baik dari internal maupun eksternal, pendapatan jasa bimbingan teknis pembudidayaan ikan dan pendapatan penggunaan sarana prasarana

C. Penerimaan umum (lain-lain) yang terdiri dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu. .

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
	9,090,940,73	13,412,266,129.0	(32.22)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	684,852,24	1,270,491,511.0	(46.10)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	1,714,677,07	560,736,924.0	205.79
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan	2,973,966,00	3,706,286,800.0	(19.76)
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan	16,965,00	34,500,000.0	(50.83)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan	404,344,48	1,045,898,254.0	(61.34)
Pendapatan Denda Lainnya	407,092	-	-
Jumlah	14,886,152,632.0	20,030,179,618.0	(25.68)

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp193,609,947,024 dan Rp185,887,444,571. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 4.16 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh karena ada penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan kenaikan gaji berkala para pegawai.. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pendapatan BLU
Rp199,041,847,271

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp14,886,152,632

Beban Pegawai
Rp193,609,947,024

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	60,825,764,15	61,900,674,99	(1.74)
Beban Pembulatan Gaji PNS	34,773,80	856,664	3,959.21
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,672,031,08	4,773,264,25	(2.12)
Beban Tunj. Anak PNS	1,439,292,62	1,483,331,59	(2.97)
Beban Tunj. Struktural PNS	737,455,00	782,360,000	(5.74)
Beban Tunj. Fungsional PNS	2,357,524,00	4,254,105,70	(44.58)
Beban Tunj. PPh PNS	573,314,88	613,374,033	(6.53)
Beban Tunj. Beras PNS	3,243,788,40	3,355,970,99	(3.34)
Beban Uang Makan PNS	8,545,071,70	7,937,940,65	7.65
Beban Tunjangan Umum PNS	918,445,00	1,014,874,60	(9.50)
Beban Uang Lembur	692,876,30	398,472,850	73.88
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	85,927,180,36	84,840,191,39	1.28
Belanja Gaji Pokok PPPK	8,669,056,58	5,648,254,85	53.48
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	177,544	108,916	63.01
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	515,528,64	301,029,970	71.25
Belanja Tunjangan Anak PPPK	142,413,10	79,982,574	78.06
Belanja Tunjangan Umum PPPK	76,155,00	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	277,780,00	207,533,720	33.85
Belanja Tunjangan Beras PPPK	535,159,66	313,288,920	70.82
Belanja Uang Makan PPPK	1,801,422,90	925,475,760	94.65
Belanja Pegawai Tunjangan	11,127,396,57	6,542,060,01	70.09
Belanja Uang Lembur PPPK	146,274,60	38,166,000	283.26
Belanja Pegawai Tunjangan Kompensasi Kerja	353,040,88	419,950,124	(15.93)
Belanja Tunjangan Lauk Pauk PPPK	-	56,176,000	(100.00)
Jumlah	193,609,947,024	185,887,444,571	4.16

*Beban Persediaan
Rp65,551,023,222*

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp65,551,023,222 dan Rp93,743,724,753

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 46.72 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan terjadi dikarenakan efisiensi anggaran sehingga berkurangnya pembelian barang persediaan.. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	41,377,988,75	73,683,919,85	(43.84)
Beban Persediaan bahan baku	6,372,904,51	17,172,591,46	(62.89)
Beban Persediaan Lainnya	2,196,536,72	2,887,213,44	(23.92)
Jumlah Beban Persediaan	65,551,023,222.00	93,743,724,753	(46.72)

*Beban Barang dan Jasa
Rp178,530,533,688*

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp178,530,533,688 dan Rp189,602,200,306.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 5.68 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan belanja barang dan jasa umumnya dikarenakan efisiensi anggaran sehingga berkurangnya belanja barang. Dan adanya tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK sehingga belanjanya pindah ke belanja pegawai.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	12,772,089,163	31,320,444,974	(59.22)
Beban Pengadaan Bahan Makanan	5,734,700	23,816,775	(75.92)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	131,407,609	516,604,855	(74.56)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33,873,399	75,343,268	(55.04)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,982,521,000	3,246,877,400	(38.94)
Beban Bahan	17,563,827,708	23,474,847,303	(25.18)
Beban Honor Output Kegiatan	1,752,228,000	11,687,688,005	(85.01)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	5,056,718,380	8,739,262,831	(42.14)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	31,729,400	124,721,000	(74.56)
Beban Langganan Listrik	30,196,925,293	33,416,902,019	(9.64)
Beban Langganan Telepon	183,826,507	190,735,138	(3.62)
Beban Langganan Air	71,003,900	65,531,200	8.35
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,348,256,172	1,653,994,204	(18.48)
Beban Jasa Konsultan	46,095,465,574	21,486,240,702	114.53
Beban Sewa	3,358,485,029	8,634,755,772	(61.11)
Beban Jasa Profesi	1,750,253,000	1,806,668,070	(3.12)
Beban Jasa Lainnya	45,324,173,687	28,855,932,077	57.07
Belanja Barang	2,507,621,726	2,882,144,977	(12.99)
Belanja Jasa	4,914,159,464	1,573,464,100	212.31
Belanja Gedung dan Bangunan -	-	4,000,000	(100.00)
Jumlah	178,530,533,688	189,602,200,306	(5.68)

*Beban Pemeliharaan
Rp29,800,413,256*

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp29,800,413,256 dan Rp39,531,632,420.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 30.38 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan dikarena adanya efisiensi anggaran sehingga berkurangnya belanja pemeliharaan. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,466,391,609	11,436,350,823	(34.71)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,015,880,545	3,973,352,625	1.07
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,155,120,646	15,101,711,519	(26.13)
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	721,168,589	1,503,288,072	(52.03)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	274,240,878	1,508,772,618	(81.82)
Beban Pemeliharaan Irigasi	577,428,500	1,264,427,378	(54.33)
Beban Pemeliharaan Jaringan	414,780,928	584,858,965	(29.08)
Jumlah	29,800,413,256	39,531,632,420	(30.38)

Beban Perjalanan Dinas
Rp34,864,136,633

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34,864,136,633 dan Rp91,348,214,338

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 61.83 persen disebabkan oleh Penurunan belanja perjalanan dinas dikarenakan program efisiensi anggaran.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	28,444,694,755	63,576,206,166	(55.26)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	406,300,092	2,110,934,275	(80.75)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	981,354,200	5,941,543,629	(83.48)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,176,059,853	17,568,265,322	(81.92)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	740,912,110	1,657,699,699	(55.30)
Belanja Perjalanan	1,115,487,623	493,565,247	126.01
Jumlah	34,864,136,633.00	91,348,214,338	(61.83)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp98,878,524,590

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp98,878,524,590 dan Rp334,615,617,843

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 70.45 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan belanja bantuan pemerintah dikarenakan program efisiensi anggaran sehingga berkurangnya belanja bantuan pemerintah. Adapun yang terealisasi berupa bantuan benih, bantuan UPR, paket budidaya ikan sistem bioflok.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	43,482,703,290	55,691,220,982.00	(21.92)
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4,264,977,428	144,206,898,965.00	(97.04)
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	4,241,915,500	4,787,047,755.00	(11.39)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	46,888,928,372	124,500,876,517.00	(62.34)
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	2,716,757,624.00	(100.00)
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki	-	-	-
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	-	-	-
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Jumlah	98,878,524,590	334,615,617,843	(70.45)

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp106,345,192,136

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp106,345,192,136 dan Rp109,487,602,990.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39,626,560,15	43,583,413,36	(9.08)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38,616,075,53	38,866,917,52	(0.65)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4,528,940,74	4,195,090,57	7.96
Beban Penyusutan Irigasi	11,378,181,51	9,267,200,26	22.78
Beban Penyusutan Jaringan	1,690,385,02	1,724,273,42	(1.97)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	58,773,20	50,575,306	16.21
Jumah Penyusutan	106,345,192,136	109,467,602,990	(1.83)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	104,345,192,136	109,467,602,990	(1.83)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp112,135

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp112,135 dan Rp24,302,442

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	112,135	23,471,225	(159.09)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian	-	-	-
Jumlah	112,135	24,302,442	(157)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-
67,149,916,912

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-67,149,916,912 dan Rp-83,310,309,741

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(68,066,543,012)	(85,391,101,888.00)	(20)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	916,626,10	2,014,396,347.0	(54)
	-	-	-
Jumlah	(67,149,916,912)	(83,338,227,741)	(19)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp130,001,508,035

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp130,001,508,035 dan Rp129,758,868,080.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	25,534,387	217,889,770.00	(88.28)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	242,851,572	1,843,226,159.00	(86.82)
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran	11,100,000	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(990,186,455)	(3,459,119,000.00)	(71)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	132,238,612,019	127,164,214,968.00	4
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	793,138,275	4,187,796,217.00	(81)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau	-	4,800,000.00	(100)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	108,464,250.00	(100)
	-	-	-
Jumlah	130,001,508,035	129,758,868,080	1.73

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T A 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T A 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
-	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN

Ekuitas Awal
Rp5,462,922,038,268

EKUITAS E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5,462,922,038,268.00 dan Rp.5,406,458,171,217.00

Defisit LO
Rp.430,800,291,658

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.430,800,291,658.00 dan Rp.885,182,156,067.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.-875,057,421 dan Rp.2,746,630,973 yaitu sebagai berikut .

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp(2,370,100)

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.(2,370,100) dan Rp.1,617,942,116.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	(2,370,100)
	-
Jumlah	(2,370,100.0)

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp(4,482,000)

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.(4,482,000) dan Rp.154,864,732. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	(4,482,000)
	-
Jumlah	(4,482,000)

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp(879,219,663)

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.(879,219,663) dan Rp.614,458,132. .

Koreksi ini Koreksi nilai aset non revaluasi adalah koreksi terhadap nilai aset yang disebabkan oleh

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(2,599,941,663)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	1,720,722,000
Jumlah	(879,219,663.0)

Koreksi Lain-Lain
Rp24,872,877

E.4.6 Koreksi Lain Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.24,872,877 dan Rp.359,365,993. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah Koreksi atas transaksi penyisihan piutang di awal tahun yang sudah di lunasi oleh debitur. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	24,872,877
-	-
Jumlah	24,872,877

Transaksi Antar Entitas
Rp1,022,090,670,858

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1,022,090,670,858 dan Rp.938,899,392,145. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	986,484,279,681
Diterima dari Entitas Lain	(20,238,353,486)
Transfer Keluar	(58,498,531,759)
Transfer Masuk	58,498,531,759
Pengesahan Hibah Langsung	3,862,926,149
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	1,981,818,514
Setoran Surplus BLU	-
Jumlah	1,022,090,670,858

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 986,484,279,681, sedangkan DDEL sebesar minus Rp20,238,353,486

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp-58,498,531,759 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	BLUPPB Karawang	533,418,150
-	-	-
Jumlah		533,418,150

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp58,498,531,759 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan mesin	Ditjen Perikanan Budidaya	1,008,876,680
Gedung Bangunan	Ditjen Perikanan Budidaya	1,177,917,120
Jalan Irigasi dan Jembatan	Ditjen Perikanan Budidaya	324,432,363
Jumlah		2,511,226,163

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3,862,926,149 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp6,053,351,218,582

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.6,053,351,218,582.00 dan Rp.5,462,922,038,268.00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Koreksi nilai persediaan sebesar Rp.1.022.000,- adalah koreksi terhadap temuan inspektorat jenderal KKP terhadap pembelian bahan konsumsi yang harus dikembalikan kepada kas negara. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp.167.415.716,- adalah koreksi terhadap temuan inspektorat jenderal KKP terhadap kekurangan volume pekerjaan pembangunan rehabilitasi calon induk dan benih di Mesuji - Lampung

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Terdapat 7 Satuan Kerja DK/TP inaktif bersaldo

yang memiliki catatan atas aset tetap dan tergabung sebagai Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang Setditjen Perikanan Budidaya Masih terdapat 6 Satker inaktif bersaldo. Rincian atas saldo persatker sebelum penyusutan adalah seperti di gambarkan dalam table berikut :

UAPKPB	Nama Satker	Saldo	Saldo
		TA 2023	TA 2024
005	Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Utk Ketahanan Pangan Dan Pengurangan Kemiskinan Di Kab Mempawah	29.800.000	29.800.000
006	Dinas Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Kota Pontianak	17.900.000	17.900.000
007	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Bitung	14.500.000	14.500.000
008	Dinas Peternakan Perikanan Kab. Bangli	81.848.750	81.848.750
009	Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Sorong	48.400.000	48.400.000
011	Pengembangan Budidaya Berkelanjutan Untuk Ketahanan Pangan Dan Pengurangan Kemiskinan Di Kabupaten Buton	6.900.000	6.900.000

3. Ruislag PT. Semeru Cemerlang

Kronologi :

- Pada tanggal 2 April 1997 Sekretaris jenderal a.n. Menteri pertanian mengirimkan surat nomor PL.210/249/B/IV/1997 hal permohonan tukar menukar (ruislag) tanah tambak aset Ditjen Perikanan di Sidoarjo.
- Kementerian Keuangan memberikan persetujuan/ izin prinsip melalui surat Nomor S-3443/A/542/0797 tanggal 25 juli 1997 hal hal permohonan tukar menukar (ruislag) tanah tambak aset Ditjen perikanan di Sidoarjo
- Kementerian keuangan memberikan persetujuan/izin pelaksanaan atas permohonan tukar menukar tersebut melalui surat nomor S-5527/A/542/1197 tanggal 27 November 1997 hal persetujuan / izin pelaksanaan tukar menukar tanah tambak milik Ditjen perikanan di desa segoro tambak kec. Sedati , kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa timur. Dalam surat tersebut termuat rincian aset pengganti yang harus disediakan oleh pengembang
- Terbit Perjanjian tukar menukar tanah dan bangunan sesuai akta Notaris nomor 51 tanggal 26 maret 1998, antara sekretaris Ditjen perikanan Departemen pertanian dengan Ir. Raden Hary Sukaryo (PT.Semeru Cemerlang)
- Dalam prosesnya, tukar menukar BMN terhenti pada tahun 1998 dikarenakan krisis moneter.
- Sesuai Surat Sekretaris jenderal Perikanan nomor PL.210/S5/2479/III/1999 tanggal 17 maret 1999 Dirjen Perikanan meminta perpanjangan waktu pelaksanaan tukar menukar dan perhitungan ulang barang pengganti.
- Sesuai Surat Sekretaris jenderal Departemen Pertanian Nomor PL.210/1122/B/XI/1999 tanggal 4 Nopember 1999, karena kondisi keamanan yang sangat rawan, adanya penjarahan terhadap bahan bangunan yang sudah dipersiapkan untuk membangun fisik di beberapa lokasi aset penukar, dan kenaikan harga bangunan dan peralatan yang sangat tinggi, Departemen Pertanian meminta persetujuan Menteri Keuangan atas rencana pengurangan aset penukar yang disediakan PT. Semeru Cemerlang
- Berdasarkan surat Direktur Jenderal perikanan Budidaya nomor 1523/DPB.0/TU.430.SI/IV/2004 tanggal 22 april 2004, hal pelaksanaan Ruislag Tanah Tambak Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur kepada Menteri keuangan, Ditjen perikanan Budidaya melaporkan bahwa sebelum dihentikan pada tahun 1998 , pengembang telah merealisasikan aset pengganti berupa :
 - 2 Unit mobil Isuzu Panther senilai Rp. 168.000.000,-
 - Pengadaan Tanah dan bangunan di kecamatan Buduran Jawa Timur senilai Rp.

77.750.000,-

- Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas senilai Rp. 43.941.000,-
- Dalam Surat tersebut diatas Ditjen Perikanan Budidaya telah mengambil langkah langkah untuk melanjutkan tukar menukar tersebut antara lain :
 - Melakukan konsultasi dengan DJA Kemenkeu yang pada prinsipnya menyetujui untuk melakukan tukar menukar dengan mengaddendum kontrak
 - Mengadakan pertemuan dengan pihak pihak terkait
 - Melakukan recheck harga tanah.
- Menteri Kelautan dan Perikanan mengirimkan surat nomor B-21/MEN-KP/I/2006 tanggal 20 Januari 2006 hal Persetujuan Penetapan Harga Tambak dan Addendum Perjanjian Ruislag yang pada pokoknya merupakan kronologi dan laporan tindak lanjut atas kegiatan tukar menukar tersebut.
- Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu menanggapi dengan surat nomor S-2860/PB.4/2006 tanggal 25 April 2006 hal Tukar Menukar Tanah Milik Departemen pertanian (sekarang Departemen Kelautan dan Perikanan) yang pada pokoknya antara lain :
 - Menyatakan bahwa keputusan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian tersebut termasuk addendum merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - Dasar penetapan harga yang digunakan adalah harga yang paling menguntungkan bagi negara .
 - Perlunya klarifikasi terhadap status aset aset yang telah diserahkan oleh pengembang.
- Pada tanggal 23 maret 2009, pengembang mengajukan permohonan penyelesaian perkara tukar menukar melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Dalam putusannya atas perkara Nomor 302/III/ARB-BANI/2009 tanggal 19 Agustus 2009 BANI memutuskan antara lain menyatakan bahwa Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan Bangunan No. 51 tanggal 26 Maret 1998 antara Departemen Pertanian (sekarang menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan) dengan PT. Semeru Cemerlang adalah sah dan mengikat para pihak dan memerintahkan ruislag perlu dilanjutkan sesuai dengan perjanjian dimaksud.
- Dirjen Kekayaan Negara sesuai surat nomor S-1062/KN/2017 tanggal 1 Agustus 2017 hal Penyelesaian Pelaksanaan Ruislag (tukar Menukar) tanah tambak sidoarjo, menyampaikan tanah tambak di desa Segoro Tambak yang merupakan objek tukar menukar adalah BMN yang seharusnya dicatat pada Departemen

Pertanian (yang sekarang beralih ke Departemen Kelautan dan perikanan)

Adapun Langkah Pengamanan Aset :

- a. Lahan seluas 472.440 m² yang menjadi objek ruislag telah di catat dalam SIMAK BMN Sekretariat DJPB KKP RI sebagai saldo awal per tanggal 3 Juli 2017.
- b. DJPB telah bersurat kepada KPKNL Jakarta Kemenkeu RI pada tanggal 28 september 2017, perihal permohonan penilaian/reevaluasi BMN terkait bmn yang akan di ruislag.

Tindak lanjut dari hal ini adalah sebagai berikut :

- DJPB sedang menelusuri eksistensi keberadaan aset pengganti yang telah diserahkan PT Semeru Cemerlang kepada KKP yang termasuk prestasi dalam perjanjian ruislag, yang akan di konversikan dengan nilai wajar saat ini sebagai bahan perbandingan persentase terhadap nilai wajar lahan segoro tambak yang telah ditetapkan BPK-RI senilai kurang lebih Rp. 117 milyar.
- DJPB dan Setjen KKP akan mengundang PT. Semeru Cemerlang untuk renegosiasi harga tanah objek ruislag agar sesuai dengan nilai wajar yang di tetapkan BPK-RI .
- KKP sudah menyampaikan surat somasi pertama kepada Direktur Utama PT Semeru Cemerlang dengan nomor B.102/MEN-SJ/PL.120/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dan di lanjutkan dengan somasi kedua dengan surat nomor B.230/MEN-SJ/PL.120/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
- Pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 di ruang Cikini 1-2 Hotel Mercure Cikini, Jakarta telah dilakukan pertemuan merupakan tindak lanjut dari somasi kedua yang disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada PT Semeru Cemerlang melalui Plh. Sekretaris Jenderal atas Menteri Kelautan dan Perikanan B.230/MEN-SJ/PL.120/IV/2023 tanggal 14 April 2023. Pertemuan dihadiri Kuasa Hukum PT Semeru Cemerlang dan Perwakilan KKP. Adapun hasil pertemuan sebagai berikut:
 - a. PT Semeru Cemerlang akan menyampaikan surat kuasa kepada Bapak Jhony Mazmur W manurung, S.H., dari Kantro hukum John Jhony and Partners selaku penerima kuasa.
 - b. KKP telah menyampaikan kronologis permasalahan terkait perjanjian ruislag antara Kementerian Pertanian (KKP) dan PT Semeru Cemerlang Nomor 51 tanggal 26 Maret 1998 dengan obyek ruislag berupa tanah tambak seluas 427.440 M² yang terletak di Kabupaten Sidoarjo oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bangunan prasarana teknologi pembenihan dan teknologi budidaya ikan oleh PT Semeru Cemerlang.
 - c. KKP akan menyampaikan kepada PT Semeru Cemerlang terkait nilai aset berdasarkan revaluasi dan penilaian terakhir dari Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
 - d. PT Semeru Cemerlang akan menyampaikan kepada Kementerian Kelautan dan

Perikanan bukti penyerahan aset pengganti yang pernah diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Pada menu To do List MONSAKTI, diketahui:

- a. Terdapat monitoring Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap pada menu To DO List aplikasi Mon sakti dengan rincian Sebagai berikut:

No	Nama Satker	Akun	Kode Barang	Harga Total	Keterangan
1	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	532111	3050000000	46.330.000	Pembelian/Pengadaan Kursi Besi untuk sarana pendukung kegiatan operasional, karena harga dibawah Rp.1.000.000 sehingga masuk aset Ekstrakomptabel
2	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	526112	3020000000	77.000.000	akun belanja 526 tp tercatatnya peralatan dan mesin
3	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	532111	3050000000	27.600.000	Ekstrakom
4	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	532111	3050000000	6.500.000	Ekstrakom

- b. Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode Persediaan, yaitu:

No	Nama Satker	Akun	Kode Barang	Harga Total	Keterangan
1	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010302001	1.300.000	Pembelian operasional perkantoran, salah menggunakan kode barang

2	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301008	18.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
3	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304004	3.600.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
4	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010302999	475.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
5	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304004	2.800.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
6	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301006	116.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
7	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301012	44.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
8	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301013	99.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
9	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301999	70.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
10	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301010	28.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
11	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304004	1.450.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
12	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304004	244.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
13	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304006	220.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
14	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304006	825.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode

15	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301001	390.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
16	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301999	180.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
17	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304004	1.200.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
18	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304004	290.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
19	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010302005	1.125.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
20	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304010	440.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
21	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301010	9.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
22	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301003	94.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
23	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010302001	700.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
24	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304004	244.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
25	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304999	180.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
26	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301003	38.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
27	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301004	24.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode

28	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301006	246.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
29	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301999	29.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
30	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010306010	100.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
31	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301003	102.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
32	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010301003	79.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode
33	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	521211	1010304004	1.220.000	Pembelian operasional perkantoran, menggunakan barang	salah kode

5. Pengungkapan KJA OFFSHORE :

A. Pelelangan dan Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak antara Dit Perbenihan dengan PT Perinus dilakukan pada tanggal 16 Desember 2017 untuk paket KJA OS di Pangandaran dan Karimun Jawa. Serta tanggal 20 Juli 2017 di Sabang (Dit. Pakan dan Obat Ikan).

B. Proses Pembayaran Progress

3 KJA OS ini merupakan pengadaan barang, bukan konstruksi, namun dalam rangka membantu Perinus agar pengadaan KJA OS ini cepat selesai, KKP mengambil inisiatif melakukan pembayaran berdasarkan progress. Pembayaran pengadaan barang berdasarkan progress, tidak diatur dan tidak dilarang dalam Perpres 54 tahun 2010.

Kronologis progress Pangandaran, Karimun Jawa dan Sabang :

- Tanggal 29 Desember 2017 (Pangandaran dan Karimun Jawa) : Pembayaran sebesar 86 % dari Nilai kontrak sebesar Rp. 73.844.878.303,- (perhitungan progress 91 %, dikurangi biaya retensi 5 %)
- Berdasarkan BAPP Tanggal 31 Desember 2017 (Sabang) : Pembayaran sebesar 90 % senilai 41.026.590.000 dengan pekerjaan fisik 95%.

- Tanggal 31 Maret 2018 : Pemberian kesempatan kepada PT. Perinus untuk menyelesaikan pekerjaan KJA OS sampai dengan 30 April 2018, karena pekerjaan belum dapat diselesaikan
- Tanggal 14 April 2018 : Perhitungan bersama antara Perinus, Dit Perbenihan dan didampingi Tim Itjen dengan hasil penilaian progress Pangandaran 91,27 % dan Karimun Jawa 88,845 %
- Tanggal 29 April 2018 : PT. Perinus menolak perpanjangan Jaminan Pelaksanaan karena merasa pekerjaan sudah selesai 100 %
- April sd Mei 2018 : Pemeriksaan Spesifikasi Kapal Workboat (WB) oleh pihak Ketiga (PT. Binocal dan BKI). Pemeriksaan spesifikasi dilakukan atas Kapal WB buatan Galangan di Batam dan Impor dari Norwegia dengan hasil sebagai berikut:
 - bahwa kedua jenis kapal bukan sister ship artinya tidak sama dari segi spesifikasi.
 - Selain itu terdapat selisih harga antara kedua jenis kapal tersebut sekitar Rp. 2,1 Milyar. Disamping itu, semua jenis kapal belum bisa di nyatakan selesai karena :
 - Tidak ditemukannya Berita Acara Sea Trial,
 - ditemukannya Berita Acara Serah Terima Kapal (dari Produsen Kapal /galangan ke Pembeli) ,
 - Sertifikat-sertifikat kapal
- September 2018 : KKP memberikan opsi kepada PT. Perinus dalam hal penyelesaian KJA OS yaitu :
 - Segera menyelesaikan pekerjaan KJA OS di 2 lokasi, atau
 - Menerbitkan Akta Pernyataan Hutang terhadap pekerjaan yang dilakukan
- November 2018 : sampai dengan bulan ini, PT. Perinus tidak menjalankan dua opsi yang ditawarkan, sehingga di lakukan Pemutusan Kontrak dan Memasukkan PT. Perinus ke dalam daftar hitam (Black List). Pemutusan kontrak ini di ikuti klausul bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Perinus tidak di terima dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - KJA OS belum teruji dan belum memenuhi kelengkapan Norwegian Standard (NS) 9415.

- Sertifikat/Dokumen kelaikan dan kelayakan untuk Kapal WB belum bisa disiapkan oleh PT. Perinus sehingga fungsi kapal untuk operasional KJA belum dapat dilakukan.
- C. Proses Peradilan dan Penyelidikan Pangandaran, Karimunjawa dan Sabang
- Januari 2019 : PT. Perinus melayangkan Gugatan perdata ke PN Jakarta Pusat, menggugat kepada KKP untuk melakukan pembayaran
 - Januari sd April 2019 : Penyelidikan oleh Kejati Jawa Barat untuk KJA OS Pangandaran Februari sd Desember 2019 : penyelidikan oleh Polda Metro Jaya
 - Progress Peradilan Perdata di PN Jakarta Pusat masih menunggu putusan perdata pada 1 November 2019
 - Untuk Kota Sabang terdapat putusan perkara perdata no 127 tanggal 25 Februari 2019.
- D. Tindak Lanjut Penyelesaian Pekerjaan KJA OFFSHORE
- Berdasarkan surat PT Perikanan Nusantara (Persero) nomor DIR/I/Dirut/102/1/2021 tanggal 16 Januari 2021 :
- PT. Perikanan Nusantara (Persero) berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan instalasi percontohan budidaya ikan lepas pantai (KJA - Offshore) sampai selesai dan selanjutnya kiranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menerimapekerjaan tersebut.
 - Terlampir kami sampaikan pernyataan kesanggupan PT Perikanan Nusantara (persero) untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan instalasi percontohan budaya ikan lepas pantai (KJA – Offshore).
 - Melalui alokasi anggaran tahun 2019, DJPB Bersama dengan PRL dan BRSDMKP telah melakukan survey lokasi untuk rencana pemindahan penempatan KJA Offshore ke Teluk Semangka Provinsi Lampung.
 - Telah di tandatanganinya nota kesepatakatan atas keberlanjutan penyelesaian KJA Offshore berdasarkan surat Direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) Nomor DIR/1/Dirut/217/IV/2021 tanggal 28 April 2021 perihal tindak lanjut penyelesaian pembanguan KJA Offshore. (terlampir)
- E. Rapat Pembahasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pencatatan Aset

Notulensi Rapat Pembahasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Aset yang di catat pada LK sebagai KDP tanggal 26 Januari 2022 dengan kesimpulan :

- Pihak BPK meminta pihak DJPB membuat surat perjanjian dengan PT. Perindo untuk kelanjutan pekerjaan KJA serta menetapkan sanksi apabila PT. Perindo tidak menepati janji;
- Pihak Kemenkeu :
 - KDP tidak dapat dipindahkan menjadi aset lainnya, sehingga lebih baik menjadi aset tetap peralatan dan mesin;
 - Sesuai KSAP terdapat 6 variasi pencatatan KDP kemungkinan perlakuan KDP DJPB tetap dicatat sebagai KDP atau KDP dapat dihapuskan;
- Pihak DJPB menghendaki KJA offshore tetap dicatat sebagai KDP, karena berkeyakinan bahwa KJA offshore tersebut akan dikerjakan hingga selesai oleh PT. Perindo pada tahun 2022;
- Inspektur III : Perlu adanya langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan KDP. Timeline perlu ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan KJA akan direlokasi ke lokasi yang potensial untuk pengembangan budidaya laut. Beberapa lokasi potensial tersebut telah dilakukan survey oleh pihak independen yaitu PT. Sucofindo (laporan terlampir).
 - Adapun lokasi tersebut yaitu Teluk Sabang – Provinsi Aceh dan Teluk Semangka – Provinsi Lampung.
 - Adapun pengelola KJA dimasing-masing lokasi yaitu BBPBL Lampung untuk KJA di Teluk Semangka dan BPBAP Ujung Batee untuk KJA di Teluk Sabang

F. Inventarisasi dan penilaian kembali

Pada tanggal 19 Januari 2023 secara serentak dilakukan inventarisasi dan penilaian kelayakan atas KDP berupa KJA Ofshore yang terletak di 3 wilayah yakni Sabang, Karimun Jawa, Pangandaran yang dalam pelaksanaannya DJPB melibatkan jasa dari SUCOFINDO sebagai ahli dalam melakukan inventarisasi dan penilaian kelayakan atas KJA tersebut, dalam inventarisasi didampingi oleh Dit. Pakan dan Obat Ikan, Dit. Perbenihan, Sekretariat DJPB, Inspektorat III, Biro Keuangan, PT. Perindo serta Sucofindo. Hasil kegiatan inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Inventarisasi yang ditandatangani oleh pendamping dan Sucofindo (terlampir). Hasil

Inventarisasi yang dilakukan oleh Sucofindo didampingi oleh tim DJPB, Inspektorat III, Biro Keuangan, dan PT. Perindo sebagai berikut:

- Pada KJA Sabang,
Unit Cages sebagian besar terangkai lengkap dan secara visual terlihat baik, akan tetapi beberapa komponen dari unit barang sebagian besar banyak yang tidak diketahui keberadaannya diantaranya Mooring System for Cages, Net Cleaner, Camera system, Mooring System for Barge dan Feed Pipe tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan pada unit Workboat dan Feed Barge beberapa komponen dari unit tersebut sebagian besar banyak yang mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat berfungsi.
- Pada KJA Pangandaran
sebagian besar komponen dari unit Cages, Mooring System for Cages, Net For Cages, Camera system, Mooring System for Barge yang tidak diketahui keberadaannya, sedangkan untuk unit Feed Barge dan Feed Pipe tidak ketahu keberadaannya. Sedangkan pada unit Workboat beberapa komponen dari unit tersebut tidak dapat berfungsi dikarenakan mengalami kerusakan, sehingga Workboat tidak dapat berfungsi. Dan untuk unit Net Cleaner kondisinya masih bisa berfungsi, namun perlu dilakukan perbaikan ringan.
- Pada KJA Karimunjawa
sebagian besar komponen dari unit Cages, Net For Cages, Net Cleaner, Workboat, Camera system Feed Barge dan Feed Pipe mengalami kerusakan dan sebagian komponen dari unit tersebut juga tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan untuk unit Mooring System for Cages dan Mooring System for Barge yang tidak diketahui keberadaannya

Hasil inventarisasi dan penilaian menunjuk kondisi (terlampir) yaitu KDP KJA Offshore yang memiliki potensi manfaat ekonomi di masa yang akan datang senilai Rp47.253.136.520,- dan dalam keadaan rusak senilai Rp67.618.331.783,-.

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sudah melakukan asersi terkait barang-barang KJA Offshore, dimana barang yang dapat diterima dan memiliki potensi manfaat dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsi Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp. 36.753.188.174,- sedangkan yang tidak dapat diterima sebesar Rp. 78.118.280.129,-

DJPB bersurat kepada BPKP dengan nomor surat B.720/DJPB/PB.150/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 perihal permohonan review inventarisasi dan penilaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) KJA Ofshore.

BPKP Cq. Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam mengundang DJPB dengan nomor surat: PE.09.00/S-23/D102/1/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Ekspose kronologis Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) KJA Offshore. Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Perbenihan DJPB, Inspektur III Inspektorat Jenderal KKP, Koordinator Keuangan dan Umum DJPB, Bagian Hukum DJPB dan auditor Inspektorat III KKP. Dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

- 1) Untuk menentukan penilaian terkini disarankan agar KKP bersurat ke KPKNL Jakarta II.
- 2) Atas Reviu Oleh BPKP telah terbit Laporan Hasil Reviu Nomor PE.09.03/LHP-84/0102/1/2023 tanggal 11 April 2023 (terlampir) dengan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan apakah pekerjaan KJA Offshore tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan secara permanen;
 - b. Mencatat pekerjaan KJA Offshore sebagai KDP dengan nilai sesuai yang tercantum dalam kontrak apabila atas KJA Offshore tersebut ditetapkan untuk dilanjutkan;
 - c. Memindahkan pencatatan KJA Offshore dari akun Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP) ke dalam akun Aset Lain-lain apabila KJA Offshore tersebut ditetapkan untuk dihentikan secara permanen;
 - d. Melakukan penelaahan dan penataan terhadap hasil inventarisasi atas KJA Offshore yang dilakukan oleh PT Sucofindo terkait kondisi barang yang sebagian sudah dalam kondisi rusak ringan, rusak berat dan tidak diketahui keberadaannya, untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
- 3) Menindaklanjuti LHR BPKP tersebut pimpinan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengambil sikap untuk menghentikan secara permanen proses Pengerjaan KDP KJA Off-Shore yang dituangkan dalam surat pernyataan nomor: B.2109/DJPB/KU.110/IV/2023 tanggal 27 April 2023 (terlampir). Hal itu sejalan dengan adanya surat dari PT. Perindo nomor: 0041/Dir.A/IV/2023 tanggal 26 April 2023 perihal komitmen penghentian permanen KJA Offshore.

G. Finalisasi tindak lanjut KDP KJA Offshore dalam laporan Keuangan Audited Tahun anggaran 2022.

- Melakukan reklasifikasi menjadi aset tetap atas KDP yang sudah dilakukan inventarisasi masing-masing menjadi 1 unit Keramba (Jaring Apung) yang tercatat pada UAPKPB Direktorat Perbenihan dan UAPKPB Direktorat Pakan dan Obat Ikan
- Melakukan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya/penghentian penggunaan aset atas Keramba (Jaring Apung) untuk selanjutnya pimpinan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya akan menempuh proses penghapusan atas KDP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah penyelesaian penghapusan KJA Offshore

- Inventarisasi ulang aset pembentuk KJA offshore.
Pelaksanaan Inventarisasi ulang atas Aset, kondisi dan pengaman atas Pengadaan KJA Offshore berupa aset bentukan yang dihasilkan dari pengadaan KJA Offshore pada 3 Lokasi yang melibatkan Inspektorat jenderal KKP, Biro Keuangan Sekretariat jenderal KKP, Tim Direktorat Teknis dan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan dilakukan secara serempak pada tanggal 18 sd 22 September 2023.
- Reklasifikasi Aset pembentuk KJA Offshore.

Atas Hasil inventarisasi dilapangan dilakukan Koreksi/Reklasifikasi Keramba jarring Apung (KJA Offshore) menjadi beberapa aset sesuai dengan aset yang terbentuk yang direkam sebagai koreksi saldo awal.

Rincian aset terbentuk pada masing-masing Lokasi adalah sebagai berikut:

Sabang (Direktorat Pakan dan Obat Ikan)

Kode Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Kuantitas	Nilai
3040108030	Keramba (Jaring Apung)	7.444.314.647	1	7.444.314.647
3040108007	Encircling Gill Net (Jaring Insang Lingkar)	7.390.089.900	1	7.390.089.900
3040102006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	925.547.250	2	1.851.094.500
3060102127	Camera Under Water	5.791.340.000	1	5.791.340.000
3020403001	Ponton	7.449.108.000	1	7.449.108.000
3120204002	Drill Pipe	1.651.680.063	1	1.651.680.063
3010204001	Kapal Tarik	7.459.802.890	1	7.459.802.890

3060347002	Genset	1.989.160.000	1	1.989.160.000
Jumlah			9	41.026.590.000

Pangandaran (Direktorat Perbenihan)

Kode Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Kuantitas	Nilai
3040108030	Keramba (Jaring Apung)	7.444.314.647	1	7.444.314.647
3040108007	Encircling Gill Net (Jaring Insang Lingkar)	6.901.252.050	1	6.901.252.050
3040102006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	743.048.177	2	1.486.096.354
3060102127	Camera Under water	4.209.073.018	1	4.209.073.018
3020403001	Ponton	7.356.990.774	1	7.356.990.774
3120204002	Drill Pipe	1.190.731.962	1	1.190.731.962
3010204001	Kapal Tarik	7.459.802.890	1	7.459.802.890
3060347002	Genset	1.748.354.922	1	1.748.354.913
Jumlah			9	37.796.616.608

Karimun Jawa (Direktorat Perbenihan)

Kode Barang	Nama Barang	Harga Satuan	Kuantitas	Nilai
3040108030	Keramba (aring Apung)	7.444.314.647	1	7.444.314.647
3040108007	Encircling Gill Net (Jaring Insang Lingkar)	6.901.252.050	1	6.901.252.050
3040102006	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	743.048.177	2	1.486.096.354
3060102127	Camera Under water	4.209.073.018	1	4.209.073.018
3020403001	Ponton	7.356.990.774	1	7.356.990.774
3120204002	Drill Pipe	1.190.731.962	1	1.190.731.962
3010204001	Kapal Tarik	7.459.802.890	1	7.459.802.890
Jumlah			8	36.048.261.695

- Perubahan Kondisi dan penghentian penggunaan Aset.

Hasil koreksi masuk atas aset tersebut telah dilakukan perubahan kondisi menjadi rusak berat dan ditindaklanjuti dengan reklasifikasi ke

- aset lainnya (penghentian penggunaan aset).
- Akan dilakukan terlebih dahulu usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas 26 NUP tersebut diatas (Karimun Jawa, Pangandaran, Sabang) kepada KPKNL Jakarta II di semester I TA. 2024
 - Setelah Penetapan Status Penggunaan sudah disetujui/terbit SK PSP akan dilakukan usulan penghapusan atas 25 NUP kepada Kanwil DJKN Jakarta pada Semester II TA. 2024
 - Untuk Aset berupa ponton kode barang 3020403001 NUP 1 yang berada di Pangandaran akan dilakukan TGR dikarenakan aset tersebut tidak diketahui keberadaannya pada saat Tim inventarisasi ke lapangan, dimana proses TGR akan dilakukan pada TA. 2024 dengan melibatkan inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan KKP.
 - Atas aset yang berlokasi di Kab Sabang telah terbit SK Penetapan status penggunaan dengan nomor 32/KM.6/KNL.0702/2024 tanggal 7 Februari 2024 dan untuk yang berlokasi di Kota Pangandaran dan Karimun Jawa terbit SK Penetapan Status Penggunaan Nomor 52/KM.6/KNL.0702/2024 tanggal 26 Februari 2024
 - Saat ini telah dilakukan pengusulan penghapusan atas 2 unit Penyemprot Mesin (Power Sprayer) yang berlokasi di Kab Pangandaran kepada KPKNL Jakarta II dikarenakan pencatatan aset tercatat di Kantor Pusat Gambir.

H. Perkara Perdata Gugatan Wanprestasi Nomor : 127/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst (Dit.POI) Nomor: 39/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst (Dit.Perbenihan)

1. Perkara Gugatan Nomor 127 dan nomor 39 tentang KJA Offshore telah diputus oleh Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2019.
2. Didalam Petitum Gugatan Perkara nomor 39 Penggugat (PT.Perinus) mendalilkan telah melaksanakan 100% perjanjian tersebut, sehingga Tergugat (KKP) harus membayar kerugian Penggugat (PT.Perinus) sebesar Rp. 13.906.006.863 (tiga belas miliar sembilan ratus enam juta enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari sisa pembayaran yang masih ditahan oleh Tergugat (KKP) ditambah dengan biaya perbaikan Keramba Jaring Apung (KJA) baik di Karimunjawa maupun di Pangandaran, namun sebaliknya

Tergugat (KKP) mendalilkan bahwa Penggugat (PT.Perinus) tidak melaksanakan perjanjian tersebut, sehingga Penggugat (PT.Perinus) harus membayar uang sejumlah Rp.86.702.352.499 (delapan puluh enam miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh dua empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari realisasi pembayaran yang telah diterima Penggugat (PT.Perinus) ditambah dengan kekurangan penerimaan Negara serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan.

3. Berdasarkan penelitian dan kajian PPK Satker Direktorat Perbenihan, sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 PT Perinus belum menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat dikenakan denda minimal selama 90 hari (31 Desember 2017 s.d. 31 Maret 2018) atau sebesar Rp6.211.434.935,35 ($1/1.000 \times \text{Rp } 69.015.943.726,10 \times 90 \text{ hari}$), dimana pengenaan denda dihitung dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai feed barges. Selain itu PPK juga menjelaskan bahwa pekerjaan KJA Karimunjawa dan Pangandaran masih dilanjutkan. PT Perinus telah melakukan pembayaran denda atas sisa pekerjaan selama 90 hari sebesar Rp1.081.913.377,00 pada tanggal 28 Maret 2018 melalui NTPN 19EI05ACORNBIK9. Atas hal ini terdapat kekurangan pembayaran denda keterlambatan minimal sebesar Rp 5.129.521.558,35 ($\text{Rp } 6.211.434.935,35 - \text{Rp } 1.081.913.377,00$).
4. Didalam Petitum Gugatan Perkara nomor 127 Penggugat (PT.Perinus) mendalilkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 18-19 April 2018 adalah *fource majeure* keadaan kahar. Tergugat (KKP) melakukan wanprestasi dengan tidak mau melakukan BAST. Sehingga Penggugat (PT.Perinus) mengalami kerugian sebesar Rp.6.159.553.784 (enam miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) sisa pembayaran yang masih ditahan KKP Kontrak Sabang sebesar Rp 4.558.510.000.
- 2) biaya perbaikan KJA Sabang sebesar Rp 1.601.043.784.

Kerugian adalah berkurangnya kekayaan kreditur sebagai akibat adanya wanprestasi yaitu belum dibayarnya pekerjaan Penggugat (PT.Perinus) yang telah diselesaikan 100% dan biaya bpemeliharaan yang dikeluarkan oleh Penggugat karena adanya kerusakan-kerusakan.

6. Berdasarkan penelitian dan kajian PPK Satker Direktorat Pakan dan Obat Ikan fakta pekerjaan tidak selesai 100%, dan dapat diketahui dari hasil pemeriksaan BPK No 14C/LHP/XVI/05/2018 tanggal 21 Mei 2018. Bahwa fakta sampai dengan saat ini meskipun telah berkali-kali diberikan kesempatan berupa 2 kali addendum, penambahan waktu sampai dengan 30 April 2018 Penggugat (PT.Perinus) tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100% sehingga komitmen yang disampaikan oleh Penggugat (PT.Perinus) kepada Tergugat (KKP) sudah tidak dapat lagi diterima karena Penggugat telah lalai dalam memenuhi prestasinya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian. Maka sesuai dengan perjanjian yang tertuang di dalam kontrak Penggugat (PT.Perinus) dikenakan denda keterlambatan yaitu sebesar Rp 3.692.393.100. Dan denda tersebut belum dibayarkan sama sekali oleh Penggugat (PT.Perinus) kepada Direktorat Pakan dan Obat Ikan.
7. Kesimpulan: Putusan dua Gugatan tersebut baik nomor 127 dan 39 dan gugatan rekonsensi KKP dinyatakan *NO (Niet Ontvankelijke)*, putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Sehingga baik KKP dan perinus tidak ada kewajiban pembayaran satu sama lain.

6. TAMBAK UDANG BERBASIS KAWASAN

Lokasi Tambak Udang Berbasis Kawasan Lokasi di Kecamatan Petanahan dan Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Potensi Luas Lahan Pembangunan 364,56 Ha, dan Rencana Pembangunan 100 Ha, rencana Tata Ruang sesuai dengan Perda No. 23 Tahun 2012 dan akses menuju lokasi sangat baik dan dekat dengan jalur lintas selatan pulau Jawa serta ketersediaan listrik yang cukup berasal dari 2 Gardu Induk yaitu Gardu Induk Gombong dan Gardu Induk Kebumen total daya 260 Mva. Pada tahun 2023, Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan telah menyerahkan operasional ke BLUPPB Karawang.

7. Penjelasan terkait satker Direktorat Produksi dan Usaha

- a. Terdapat piutang lainnya sebesar Rp413.513.040,- yang terdiri dari :
 - Temuan Inspektorat Jenderal 2017 mengenai kegiatan kekerangan sebesar Rp137.690.000,-
 - Temuan Inspektorat Jenderal No. 5.29/ITJ.3/HP.410/IV/2019 merupakan kegiatan saran budidaya rumput laut sebesar Rp315.823.040,- sudah dilakukan cicilan sebesar Rp25.000.000,- dan Rp15.000.000,- sisa Rp275.823.040,-
- b. Terdapat piutang lainnya sebesar Rp136.465.703, yang terdiri :
 - Temuan Itjen CV. Cahaya Abadi melakukan pekerjaan paket bantuan budidaya lele system bioflok di Jawa Tengah dengan rincian nilai pekerjaan sebesar Rp719.466.426,- yang dibayarkan sebesar Rp1.034.093.072,- sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp314.626.646,- pada tahun 2018 dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp267.710.337,- sehingga masih memiliki kekurangan bayar sebesar Rp46.916.309,-
 - Temuan BPK RI Terdapat pekerjaan pagar SKPT Sumba Timur yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga CV Satria Rumpun Hijau diharuskan mengembalikan sebesar Rp70.830.000,- dan telah dilakukan pembayaran cicilan sebesar Rp10.000.000,- pada semester 1 2018 sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.60.830.000,-
 - Temuan BPK RI Pekerjaan lantai jemur pada lokasi SKPT Sumba Timur tidak sesuai kontrak sehingga CV Cipta Prasarana harus mengembalikan sebesar Rp101.438.788,- yang telah dilakukan pembayaran sebesar Rp50.719.394,-; Rp12.000.00,-; Rp10.000.000,- sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp28.719.394,-

8. PHLN pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Pada Akhir Tahun 2022, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mendapatkan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dari Asian Development Bank senilai JPY 13.940.700.000,00 yang akan efektif pelaksanaannya mulai tahun 2023. PHLN yang didapatkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya akan dimanfaatkan untuk

Proyek Peningkatan Infrastruktur untuk Budidaya Udang (Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project-IISAP), proyek tersebut akan membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memperkenalkan budidaya udang berkelanjutan dan meningkatkan transparansi, serta proses ketertelusuran menuju peningkatan produktivitas, kualitas, profitabilitas, dan lingkungan. Keberlanjutan budidaya udang skala kecil. Total Biaya pelaksanaan proyek IISAP sebesar JPY 13.940.700.000,00 direncanakan untuk mendanai kegiatan yang akan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Pembiayaan bersumber dari Loan ADB-4283 INO sebesar JPY 13.940.700.000,00.

Instansi pelaksana IISAP adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya – KKP dan Unit Pelaksana Teknis- Ditjen Perikanan Budidaya - KKP. Secara teknis, jenis dan lokasi kegiatan dapat dibagi, menjadi:

- a. Perencanaan, koordinasi, konsultasi, dan peningkatan kapasitas SDM, akan dilakukan di Kantor Pusat – Ditjen Perikanan Budidaya;
- b. Pembangunan fisik dan kegiatan teknis, akan dilakukan di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis/ UPT – DJPB ditingkat daerah sesuai wilayah kerja UPT.

Profil Umum IISAP

Aspek	Pengaturan
Nama Proyek dan Komponen	<i>Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project-IISAP</i> Komponen Kegiatan - <i>Output 1: Quality and sustainability of inputs for shrimp production increased</i> - <i>Output 2: Sustainable aquaculture infrastructure and services developed</i> - <i>Output 3: Shrimp aquaculture supply chain strengthened</i>
Nilai Pinjaman	JPY 13,940,700,000 (thirteen billion nine hundred forty million seven hundred thousand Yen)
Nomor Pinjaman	Loan 4283-INO
Nomor Registrasi Pinjaman	1XXHF3RA
Tanggal Penandatanganan	19 December 2022
Tanggal Efektif	23 Januari 2023
Completion date	31 December 2027
Closing date	30 June 2028
Periode Pelaksanaan Pinjaman	23 January 2023–31 December 2027
Nomor Rekening Khusus	601062111980
Management	
(i) Executing agency	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Kementerian Perikanan dan Kelautan
(iii) Implementation units	(i) CPMU, DJPB (ii) PIU: 6 UPT

Alokasi Penarikan berdasarkan Kategori Belanja			
No	Item	Total Amount Allocated for ADB Financing*	Basis for Withdrawal from the Loan Account
		JPY	
		Category	
1	Works and Goods	9,921,782,000	100% of total expenditure claimed**
2	Services, studies, trainings and Project management costs	4,018,918,000	100% of total expenditure claimed**
	TOTAL	13,940,700,000	
Sumber Dana Pinjaman dan Proporsi Pembebanan			
No	Lender	Percentage	
1	Asian Development Bank (ADB)	100%	

Selama periode berjalan, CPMU IISAP memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari sumber dana loan dengan nomor register *LOAN ADB 4283 INO* yang terbagi di 1 CPMU Kementerian Ditjen Perikanan Budi Daya, 6 UPT/PIU.

Anggaran berdasarkan Jenis Belanja TA.2024

Utraian	Catatan	Budget DIPA TA 2024 (Rp)
Pendapatan	B.1	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak		-
Jumlah Pendapatan		
Belanja	B.2	
Belanja Barang dan Jasa	B.3	
Belanja Keperluan Perkantoran	B.3.1.1	50.000.000
Belanja Barang Operasional Lainnya	B.3.1.2	617.919.000
Belanja Bahan	B.3.2.1	944.112.000
Belanja Honor Output Kegiatan	B.3.2.2	66.000.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	B.3.2.3	4.956.529.000
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	B.3.3.1	6.000.000
Belanja Jasa Konsultan	B.3.3.2	28.121.648.000
Belanja Sewa	B.3.3.3	280.900.000
Belanja Jasa Profesi	B.3.3.4	123.200.000

Belanja Jasa Lainnya	B.3.3.5	81.150.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	B.3.4.1	3.607.532.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	B.3.4.2	354.272.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	B.3.4.3	3.373.362.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	B.3.4.4	477.150.000
Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri	B.3.5	3.000.000.000
Jumlah Anggaran Belanja Barang dan Jasa		46.059.774.000
Belanja Modal	B.4	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.4.1	21.200.000.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.4.2	2.740.226.000
Jumlah Anggaran Belanja Modal		23.940.226.000
Jumlah Anggaran		70.000.000.000

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester 1 TA 2024

Uraian	Catatan	Anggaran DIPA	Realisasi	%
Pendapatan	B.1	-	-	
Pendapatan Negara Bukan Pajak		-	-	
Jumlah Pendapatan				
Belanja	B.2			
Belanja Barang dan Jasa	B.3			
Belanja Keperluan Perkantoran	B.3.1.1	50.000.000	29.423.110	58,85 %
Belanja Barang Operasional Lainnya	B.3.1.2	617.919.000	-	0,00%
Belanja Bahan	B.3.2.1	944.112.000	102.137.865	10,82 %
Belanja Honor Output Kegiatan	B.3.2.2	66.000.000	15.000.000	22,73 %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	B.3.2.3	4.956.529.000	4.000.000.000	80,70 %
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	B.3.3.1	6.000.000	-	
Belanja Jasa Konsultan	B.3.3.2	28.121.648.000	7.831.875.300	27,85 %
Belanja Sewa	B.3.3.3	280.900.000	226.640.000	80,68 %
Belanja Jasa Profesi	B.3.3.4	123.200.000	9.000.000	7,31%
Belanja Jasa Lainnya	B.3.3.5	81.150.000	28.055.000	34,57 %
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	B.3.4.1	3.607.532.000	1.600.223.022	44,36 %

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	B.3.4.2	354.272.000	227.623.290	64,25 %
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	B.3.4.3	3.373.362.000	192.927.000	5,72%
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	B.3.4.4	477.150.000	112.325.000	23,54 %
Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri	B.3.5	3.000.000.000	983.823.392	32,79 %
Jumlah Anggaran Belanja Barang dan Jasa		46.059.774.000	15.359.052.979	33,35 %
Belanja Modal	B.4			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.4.1	21.200.000.000	-	0,00%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	B.4.2	2.740.226.000	-	0,00%
Jumlah Anggaran Belanja Modal		23.940.226.000	-	0,00%
Jumlah Anggaran		70.000.000.000	15.359.052.979	21,94 %

9. LHP BPK RI Tahun 2018 atas LK KKP 2017

Terdapat temuan denda keterlambatan PT Titian Karya Mandiri senilai Rp250.735.763,00. Direktorat Pakan dan Obat Ikan telah melimpahkan ke PUPN dengan nomor 11499/DJPB.D3/TU.210/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 dengan nomor SP3N SP3N-766/PUPNC.10.02/2020 tanggal 18 Desember 2020. Dari hasil penelusuran tim KPKNL Jakarta II dan tim Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya bahwa diketahui :

Ketidaksepaahaman perhitungan antara rekanan dan BPK sehingga menjadi temuan BPK tahun 2018. Perusahaan telah membayar keterlambatan sekitar Rp99.510.000,00 dari sebagian pekerjaan yg terdapat dalam kontrak sedangkan perhitungan BPK diambil dari keseluruhan kontrak sehingga terdapat selisih perhitungan. kondisi terkini dimana temuan BPK Rp350.245.763.,35, kantor alamat perusahaan yang terdata sudah tutup dan direktur utama bapak Jafar mengalami penyakit stroke. DJPB dan tim KPKNL Jakarta II sudah menemui salah satu komisaris yang juga kakak kandung dari Bapak Jafar, dimana mereka juga sedang mengalami kasus penipuan (bukti bapak Jafar stroke dan laporan kepolisian terlampir). Direktur perusahaan tidak setuju atas perhitungan BPK dan tidak berkenan membayar.

Piutang tidak tercatat pada LK yang berupa denda karena SKTJM tidak berhasil dibuat dan pada saat itu tidak ada ketentuan denda keterlambatan di catat dalam Laporan Keuangan. Untuk selisih dendanya telah diajukan ke PUPN.

10. KONSEP TEMUAN BPK atas LK 2023

1. Pekerjaan Belanja Barang Pengadaan HDPE Kluster Nila pada Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang tidak sesuai kontrak senilai Rp86.200.200,00

Terdapat Kelebihan pembayaran belanja barang pengadaan plastic HDPE senilai Rp86.200.200,00 dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN nomor 1F3703CIFK71DU4M tanggal 3 Mei 2024.

2. Tiga Paket Pekerjaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Ditjen Perikanan Budi Daya tidak sesuai kontrak

Dari hasil pemeriksaan BPK RI terdapat 3 pekerjaan yang tidak sesuai kontrak yaitu :

- a. Pekerjaan bantuan sarana budidaya rumput laut (SBRL) tidak sesuai kontrak senilai Rp57.239.640,00, dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN nomor 808CD6U8EUE4BNH5 tanggal 24 April 2024.
- b. Pekerjaan Pembangunan unit produksi bibit rumput laut kultur jaringan (UPBRL) tidak sesuai kontrak senilai Rp15.465.299,00, dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN nomor 2C6610NA04DO959P tanggal 3 Mei 2024.
- c. Pekerjaan bantuan kebun bibit rumput laut (KBRL) tidak sesuai kontrak senilai Rp21.931.400,00, dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN nomor AF7B96U8EUE4BOQS tanggal 24 April 2024.

3. Belanja Perjalanan Dinas Senilai Rp254.940.600,00 pada Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dipertanggungjawabkan tidak sesuai kondisi riil

Atas temuan tersebut telah disetorkan ke kas negara dengan NTPN nomor 955EF61QV3RUI4OP tanggal 26 April 2024.

4. Pencatatan Persediaan Hewan dan Tanaman Untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi

Dalam hal ini telah dilakukan jurnal koreksi terhadap 8 (delapan) satuan kerja lingkup

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu : BPBAT Sungai Gelam, BPBL Ambon, BBPBAT Sukabumi, BPBAT Tatelu, BPBAP Takalar, BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara dan BLUPPB Karawang.

5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai Tugas pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tidak sesuai ketentuan senilai Rp15.537.050,00

Jumlah tersebut terdiri dari kelebihan pembayaran sampai tahun 2023 senilai 11.167.050 yaitu Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja s.d Desember 2023 sebesar 2.716.800; Kelebihan Pembayaran Gaji s.d Desember 2023 sebesar 1.430.250; dan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional s.d Desember 2023 sebesar 7.020.000 dan Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional pada tahun 2024 sebesar 4.370.000. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran pengembalian belanja oleh masing-masing pegawai yang pembayarannya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

6. Pekerjaan Konstruksi BUBK Tahap II pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tidak sesuai kontrak senilai Rp203.549.368,00, Pekerjaan Landscape Belum termanfaatkan senilai Rp52.297.730,00 dan Mesin yang tidak berfungsi senilai Rp668.230.500,00

Atas Temuan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN 829F448WEMDGI3G tanggal 4 April 2024 sebesar Rp113.731.802,00 dan NTPN EB8C648VVEMDGIVI tanggal 4 April 2024 sebesar Rp89.817.566,00

7. Pengelolaan PNBP Pendapatan Sewa Sarana dan Prasarana Berupa Sewa Wisma/Asrama dan Ruang Pertemuan/Aula pada BBPBAT Sukabumi Belum memadai

Atas Temuan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan NTPN FCC920NA04CSUL5N tanggal 3 April 2024 senilai Rp440.000,00.

Catatan lain-lain atas Laporan Keuangan Tahun 2023 yang masih perlu di tindak lanjut pada periode Tahun 2024.

1. Hasil pekerjaan Jasa Konstruksi BUBK kebun Tahap II masih tercatat secara gelondongan/belum di detailkan sesuai dengan fisik yang terbentuk dilapangan.
 - ⇒ Telah dilakukan inventarisasi dalam rangka pendetailan asset hasil pengadaan konstruksi BUBK tahap II yang dilaksanakan oleh pelaksana dari Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan, Pelaksana dari BLUPPB Karawang, Pelaksanadari Setditjen Perikanan Budidaya didampingi oleh Pelaksan dari Adhi karya dan Pengelola BUBK kebun
 - ⇒ Telah di susun pendetailan asset serta nilai perolehan peraset atas pekerjaan tersebut sesuai Berita Acara Inventarisasi nomor B.581/DJPB.2/PL.760/III/2024 tanggal 7 Maret 2024
 - ⇒ Akan di lakukan koreksi pendetailan asset sesuai hasil Inventarisasi pada Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan periode Semester I Tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian nilai atas kekurangan volume pekerjaan hasil Audit terinci LK Tahun 2023 oleh tim BPK RI serta penggabungan nilai atas pengadaan HDPE dengan menggunakan akun belanja bahan.
 - ⇒ Penyusunan BAST serta penyerahan asset kepada BLUPPB Karawang dilakukan di Semester I Tahun 2024
2. Penghapusan atas KDP berupa jasa Konsultan perencana yang tidak direalisasikan pengadaan konstruksinya pada BPBAT Sungai Gelam, BPBAP takalar dan BPBAP Situbondo
3. Inventarisasi asset tetap pada 12 Satker Dekonsentrasi lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya dalam rangka penyelesaian Hibah/Penghapusan BMN
4. Pengusulan/Penetapan atas nilai PP PNBPN terhadap beberapa komoditas hasil produksi budidaya yang belum terakomodir dalam PP85 tahun 2021.

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl. Cetak 11/05/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	9,684,074,100	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	68,221,487,743	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	5,000,000,000	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	84,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	5,521,882,227	0
0.0	115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	166,243,450	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	84,000,000
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	824,320,347
0.0	116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	831,217
0.0	117111	Barang Konsumsi	10,324,037,170	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	106,495,137	0
0.0	117114	Suku Cadang	1,373,982,570	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	12,297,178,010	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	426,892,990	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1,025,355,500	0
0.0	117129	Persediaan Dalam Proses	3,753,169,438	0
0.0	117131	Bahan Baku	3,985,129,192	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	5,694,904,804	0
0.0	131111	Tanah	3,756,767,517,642	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	922,411,425,057	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,313,698,875,867	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	75,254,478,215	0
0.0	134112	Irigasi	421,255,626,270	0
0.0	134113	Jaringan	54,465,892,504	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	2,736,548,559	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,913,308,790	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	23,005,851,182	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	784,503,953,667
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	266,599,885,582
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	37,563,741,218
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	236,672,990,817
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	13,038,609,268
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	220,260,839
0.0	138311	Properti Investasi	151,245,930,000	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	44,841,144,544
0.0	162151	Software	4,413,525,748	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	243,825,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl. Cetak 11/05/2026
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	198,690,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	8,217,751,805	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	147,767,675,991	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1,517,845,250	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	139,135,362,060
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,796,586,840
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1,517,845,250
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	228,879,584
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,793,243,161
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	8,217,751,805
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	9,684,074,100
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	134,081,644
0.0	391111	Ekuitas	0	5,462,922,038,268
JUMLAH			7,012,779,600,211	7,012,779,600,211

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM
Tgl Cetak : 11/05/26 3:01 PM
Halaman : 1
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	9,684,074,100	(9,684,074,100)	(100.00)
Kas pada Badan Layanan Umum	125,066,911,108	68,221,487,743	56,845,423,365	83.32
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	100,000,000,000	5,000,000,000	95,000,000,000	1,900.00
Piutang Bukan Pajak	11,444,218,611	5,605,882,227	5,838,336,384	104.15
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(9,739,323,477)	(908,320,347)	(8,831,003,130)	972.23
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,704,895,134	4,697,561,880	(2,992,666,746)	(63.71)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	0	166,243,450	(166,243,450)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	0	(831,217)	831,217	(100.00)
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	0	165,412,233	(165,412,233)	(100.00)
Persediaan	126,183,212,875	38,987,144,811	87,196,068,064	223.65
JUMLAH ASET LANCAR	352,955,019,117	126,755,680,767	226,199,338,350	178.45
ASET TETAP				
Tanah	3,792,279,477,365	3,756,767,517,642	35,511,959,723	0.95
Peralatan dan Mesin	952,688,528,934	922,411,425,057	30,277,103,877	3.28
Gedung dan Bangunan	1,416,541,076,707	1,313,698,875,867	102,842,200,840	7.83
Jalan, Irigasi dan Jaringan	552,929,175,841	550,975,996,989	1,953,178,852	0.35
Aset Tetap Lainnya	4,584,886,569	4,649,857,349	(64,970,780)	(1.40)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	333,300,821,067	23,005,851,182	310,294,969,885	1,348.77
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,460,023,361,455)	(1,338,599,441,391)	(121,423,920,064)	9.07
JUMLAH ASET TETAP	5,592,300,605,028	5,232,910,082,695	359,390,522,333	6.87
Properti Investasi				
Properti Investasi	38,572,215,000	151,245,930,000	(112,673,715,000)	(74.50)
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(7,154,978,387)	(44,841,144,544)	37,686,166,157	(84.04)
JUMLAH Properti Investasi	31,417,236,613	106,404,785,456	(74,987,548,843)	(70.47)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	16,122,540,748	4,657,350,748	11,465,190,000	246.17
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	198,690,000	(198,690,000)	(100.00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	257,258,170,168	8,217,751,805	249,040,418,363	3,030.52
Aset Lain-lain	132,565,448,459	149,285,521,241	(16,720,072,782)	(11.20)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(132,522,905,285)	(144,449,794,150)	11,926,888,865	(8.26)
JUMLAH ASET LAINNYA	273,423,254,090	17,909,519,644	255,513,734,446	1,426.69
JUMLAH ASET	6,250,096,114,848	5,483,980,068,562	766,116,046,286	13.97
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	195,474,819,881	20,923,948,650	174,550,871,231	834.22
Pendapatan Diterima Dimuka	1,270,076,385	134,081,644	1,135,994,741	847.24

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM
Tgl Cetak : 11/05/26 3:01 PM
Halaman : 2
lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	196,744,896,266	21,058,030,294	175,686,865,972	834.30
JUMLAH KEWAJIBAN	196,744,896,266	21,058,030,294	175,686,865,972	834.30
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	6,053,351,218,582	5,462,922,038,268	590,429,180,314	10.81
JUMLAH EKUITAS	6,053,351,218,582	5,462,922,038,268	590,429,180,314	10.81
JUMLAH EKUITAS	6,053,351,218,582	5,462,922,038,268	590,429,180,314	10.81
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6,250,096,114,848	5,483,980,068,562	766,116,046,286	13.97

Keterangan :
FINAL

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UAPPB-E1 : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl.Data : 11/05/26 12:38 PM
Tgl.Cetak : 11/05/26 3:06 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	40,623,638,997
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	28,050,498
117114	Suku Cadang	662,644,831
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	11,089,686,917
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	59,685,994,122
117131	Bahan Baku	2,777,304,513
117199	Persediaan Lainnya	11,315,892,997
131111	Tanah	3,792,279,477,365
132111	Peralatan dan Mesin	952,688,528,934
133111	Gedung dan Bangunan	1,416,541,076,707
134111	Jalan dan Jembatan	76,495,798,435
134112	Irigasi	421,967,484,902
134113	Jaringan	54,465,892,504
135111	Aset Tetap Renovasi	2,818,527,559
135121	Aset Tetap Lainnya	1,766,359,010
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	333,300,821,067
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(807,462,885,109)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(347,393,646,959)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(42,221,531,746)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(247,937,269,299)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(14,728,994,297)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(279,034,045)
138311	Properti Investasi	38,572,215,000
138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(7,154,978,387)
162151	Software	15,680,025,748
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	442,515,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	131,008,126,009
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	1,512,645,250
166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	44,677,200
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(125,312,891,807)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(5,697,368,228)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(1,512,645,250)
J U M L A H		5,766,066,138,438

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 04

Tgl Data : 11/05/26 7:25 AM
Tgl Cetak : 11/05/26 3:04 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	50,589,862,000	219,506,674,207	168,916,812,207	433.89	52,426,593,000	117,016,527,359	64,589,934,359	223.2
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	35,150,000,000	199,268,320,721	164,118,320,721	566.91	37,285,364,000	92,373,273,693	55,087,909,693	247.75
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	15,439,862,000	20,238,353,486	4,798,491,486	131.08	15,141,229,000	24,643,253,666	9,502,024,666	162.76
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	50,589,862,000	219,506,674,207	168,916,812,207	433.89	52,426,593,000	117,016,527,359	64,589,934,359	223.2
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,435,421,390,000	1,083,907,177,037	(351,514,212,963)	75.51	1,227,143,203,000	992,008,206,671	(235,134,996,329)	80.84
1. Belanja Pegawai	195,625,149,000	193,774,768,586	(1,850,380,414)	99.05	186,783,785,000	185,892,176,729	(891,608,271)	99.52
2. Belanja Barang	546,046,993,000	456,121,518,392	(89,925,474,608)	83.53	732,542,591,000	711,938,177,892	(20,604,413,108)	97.19
3. Belanja Modal	693,749,248,000	434,010,890,059	(259,738,357,941)	62.56	307,816,827,000	94,177,852,050	(213,638,974,950)	30.6
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA 04

Tgl Data : 11/05/26 7:25 AM
Tgl Cetak : 11/05/26 3:04 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,435,421,390,000	1,083,907,177,037	(351,514,212,963)	75.51	1,227,143,203,000	992,008,206,671	(235,134,996,329)	80.84
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 **KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
ESELON I : 04 **DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 11/05/26 3:04 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan	14,360,000	582,270,000	0	582,270,000	4054.81
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1,293,450,000	709,405,500	3,750,000	705,655,500	54.56
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	1,307,810,000	1,291,675,500	3,750,000	1,287,925,500	98.48
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	158,828,863,000	0	158,828,863,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	0	158,828,863,000	0	158,828,863,000	
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	6,338,656,931	0	6,338,656,931	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	33,433,250,000	32,126,287,117	0	32,126,287,117	96.09
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	100,000,000	78,553,533	0	78,553,533	78.55
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	308,940,000	546,515,000	0	546,515,000	176.9
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	61,519,640	0	61,519,640	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	33,842,190,000	39,151,532,221	0	39,151,532,221	115.69
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan	12,676,651,000	9,090,940,733	0	9,090,940,733	71.71
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	916,626,100	0	916,626,100	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	148,838,000	1,760,616,989	0	1,760,616,989	1182.91
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	318,240,000	1,714,677,074	0	1,714,677,074	538.8
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	13,143,729,000	13,482,860,896	0	13,482,860,896	102.58
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	2,286,133,000	2,973,966,000	0	2,973,966,000	130.09
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	2,286,133,000	2,973,966,000	0	2,973,966,000	130.09

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 11/05/26 3:04 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	10,000,000	16,965,000	0	16,965,000	169.65
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	10,000,000	16,965,000	0	16,965,000	169.65
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	404,344,485	0	404,344,485	0
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	407,092	0	407,092	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	404,751,577	0	404,751,577	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	25,534,387	0	25,534,387	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,006,986,908	0	3,006,986,908	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	327,288,718	0	327,288,718	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	3,359,810,013	0	3,359,810,013	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	50,589,862,000	219,510,424,207	3,750,000	219,506,674,207	433.89
	JUMLAH PENDAPATAN	50,589,862,000	219,510,424,207	3,750,000	219,506,674,207	433.89

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 11/05/26 3:05 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100 632462	DKI JAKARTA SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	0	3,477,442,129	0	3,477,442,129	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	0	3,477,442,129	0	3,477,442,129	0
0200 238734 445393	JAWA BARAT BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	2,099,116,000 21,700,000,000	3,020,131,752 26,213,081,841	0 0	3,020,131,752 26,213,081,841	143.88 120.8
	JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT	23,799,116,000	29,233,213,593	0	29,233,213,593	132.34
0300 239192	JAWA TENGAH BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	6,350,000,000	5,635,804,473	3,750,000	5,632,054,473	88.69
	JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH	6,350,000,000	5,635,804,473	3,750,000	5,632,054,473	88.69
0500 567350	JAWA TIMUR BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	7,100,000,000	168,354,935,340	0	168,354,935,340	2371.2
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	7,100,000,000	168,354,935,340	0	168,354,935,340	2,371.2
0600 567385	NANGGROE ACEH DARUSSALAM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	1,270,315,000	1,088,887,502	0	1,088,887,502	85.72
	JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1,270,315,000	1,088,887,502	0	1,088,887,502	85.72
1000	JAMBI					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 11/05/26 3:05 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	1,633,000,000	1,657,860,765	0	1,657,860,765	101.52
	JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI	1,633,000,000	1,657,860,765	0	1,657,860,765	101.52
1200	LAMPUNG					
427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	1,248,703,000	919,552,243	0	919,552,243	73.64
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	1,248,703,000	919,552,243	0	919,552,243	73.64
1500	KALIMANTAN SELATAN					
567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	1,250,000,000	1,398,662,364	0	1,398,662,364	111.89
	JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN	1,250,000,000	1,398,662,364	0	1,398,662,364	111.89
1700	SULAWESI UTARA					
538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	1,232,596,000	781,517,838	0	781,517,838	63.4
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	1,232,596,000	781,517,838	0	781,517,838	63.4
1900	SULAWESI SELATAN					
567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	1,778,702,000	1,630,415,354	0	1,630,415,354	91.66
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	1,778,702,000	1,630,415,354	0	1,630,415,354	91.66
2100	MALUKU					
567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	997,400,000	714,008,616	0	714,008,616	71.59
	JUMLAH PENDAPATAN (2100) - MALUKU	997,400,000	714,008,616	0	714,008,616	71.59

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
ESELON I : 04 DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 11/05/26 3:05 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
2200 445394	BALI BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	724,000,000	591,421,064	0	591,421,064	81.69
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	724,000,000	591,421,064	0	591,421,064	81.69
2300 567762	NUSA TENGGARA BARAT BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	781,085,000	900,456,962	0	900,456,962	115.28
	JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT	781,085,000	900,456,962	0	900,456,962	115.28
2900 567800	BANTEN BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	1,110,000,000	2,475,826,291	0	2,475,826,291	223.05
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	1,110,000,000	2,475,826,291	0	2,475,826,291	223.05
3200 567474	KEPULAUAN RIAU BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	1,314,945,000	650,419,673	0	650,419,673	49.46
	JUMLAH PENDAPATAN (3200) - KEPULAUAN RIAU	1,314,945,000	650,419,673	0	650,419,673	49.46
	JUMLAH PENDAPATAN	50,589,862,000	219,510,424,207	3,750,000	219,506,674,207	237.092

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 11/05/26 3:05 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
7021	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	12,989,000,000	1,707,546,000	1,668,560,946	0	1,668,560,946	97.72	38,985,054
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	14,497,814,000	404,625,513,000	402,469,826,819	181,277,439	402,288,549,380	99.42	2,336,963,620
7023	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	30,946,059,000	13,463,914,000	13,907,638,022	505,721,503	13,401,916,519	99.54	61,997,481
7024	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	56,802,710,000	129,459,550,000	128,570,845,731	222,739,648	128,348,106,083	99.14	1,111,443,917
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	115,235,583,000	549,256,523,000	546,616,871,518	909,738,590	545,707,132,928	98.955	3,549,390,072
WA	Program Dukungan Manajemen							
2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	352,624,146,000	322,556,485,000	315,538,674,646	185,366,867	315,353,307,779	97.77	7,203,177,221
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	352,624,146,000	322,556,485,000	315,538,674,646	185,366,867	315,353,307,779	97.77	7,203,177,221
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	467,859,729,000	871,813,008,000	862,155,546,164	1,095,105,457	861,060,440,707	98.718	10,752,567,293
02	PINJAMAN LUAR NEGERI							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
7021	Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	10,000,000,000	10,000,000,000	4,347,159,510	0	4,347,159,510	43.47	5,652,840,490
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	385,050,000,000	450,000,000,000	157,646,198,861	410,545,700	157,235,653,161	34.94	292,764,346,839
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	395,050,000,000	460,000,000,000	161,993,358,371	410,545,700	161,582,812,671	39.205	298,417,187,329
	JUMLAH BELANJA PINJAMAN LUAR NEGERI	395,050,000,000	460,000,000,000	161,993,358,371	410,545,700	161,582,812,671	39.205	298,417,187,329
03	RUPIAH MURNI PENDAMPING							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	0	7,500,000,000	7,500,000,000	0	7,500,000,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 11/05/26 3:05 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	0	7,500,000,000	7,500,000,000	0	7,500,000,000	100	0
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI PENDAMPING	0	7,500,000,000	7,500,000,000	0	7,500,000,000	100	0
04	PNBP							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	2,925,479,000	2,925,479,000	1,444,327,580	0	1,444,327,580	49.37	1,481,151,420
7023	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	4,148,184,000	4,148,184,000	1,632,421,944	0	1,632,421,944	39.35	2,515,762,056
7024	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	4,792,262,000	4,792,262,000	3,264,276,779	0	3,264,276,779	68.12	1,527,985,221
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	11,865,925,000	11,865,925,000	6,341,026,303	0	6,341,026,303	52.28	5,524,898,697
	JUMLAH BELANJA PNPB	11,865,925,000	11,865,925,000	6,341,026,303	0	6,341,026,303	52.28	5,524,898,697
06	BADAN LAYANAN UMUM							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	17,991,371,000	34,412,642,000	22,365,784,501	0	22,365,784,501	64.99	12,046,857,499
7023	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	7,419,355,000	7,419,355,000	260,539,900	0	260,539,900	3.51	7,158,815,100
7024	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	6,138,287,000	1,990,948,000	191,669,780	0	191,669,780	9.63	1,799,278,220
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	31,549,013,000	43,822,945,000	22,817,994,181	0	22,817,994,181	26.043	21,004,950,819
WA	Program Dukungan Manajemen							
2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	3,600,987,000	3,600,987,000	791,758,423	0	791,758,423	21.99	2,809,228,577
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	3,600,987,000	3,600,987,000	791,758,423	0	791,758,423	21.99	2,809,228,577
	JUMLAH BELANJA BADAN LAYANAN UMUM	35,150,000,000	47,423,932,000	23,609,752,604	0	23,609,752,604	25.03	23,814,179,396
09	HIBAH LUAR NEGERI							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
UNIT ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 11/05/26 3:05 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
7024	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	12,964,000,000	12,964,000,000	0	0	0	0	12,964,000,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	12,964,000,000	12,964,000,000	0	0	0	0	12,964,000,000
	JUMLAH BELANJA HIBAH LUAR NEGERI	12,964,000,000	12,964,000,000	0	0	0	0	12,964,000,000
19	SALDO AWAL BLU							
HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
7022	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Payau	0	8,412,186,000	8,392,121,646	0	8,392,121,646	99.76	20,064,354
7023	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	0	10,105,000,000	10,089,461,717	0	10,089,461,717	99.85	15,538,283
7024	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	0	4,147,339,000	4,147,337,885	0	4,147,337,885	100	1,115
	JUMLAH BELANJA PROGRAM HB	0	22,664,525,000	22,628,921,248	0	22,628,921,248	99.87	35,603,752
WA	Program Dukungan Manajemen							
2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	0	1,190,000,000	1,184,223,504	0	1,184,223,504	99.51	5,776,496
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	0	1,190,000,000	1,184,223,504	0	1,184,223,504	99.51	5,776,496
	JUMLAH BELANJA SALDO AWAL BLU	0	23,854,525,000	23,813,144,752	0	23,813,144,752	99.78	41,380,248
	JUMLAH	922,889,654,000	1,435,421,390,000	1,085,412,828,194	1,505,651,157	1,083,907,177,037	66.4	351,514,212,963

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/26 3:04 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	64,988,039,000	60,938,999,000	60,840,859,730	22,477,173	60,818,382,557	99.8	120,616,443
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9,985,000	957,000	789,228	8,169	781,059	81.62	175,941
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5,068,727,000	4,683,856,000	4,672,479,858	180,400	4,672,299,458	99.75	11,556,542
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,561,623,000	1,441,448,000	1,439,474,639	72,160	1,439,402,479	99.86	2,045,521
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,362,930,000	740,404,000	737,455,000	0	737,455,000	99.6	2,949,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5,500,081,000	2,396,852,000	2,363,859,000	6,335,000	2,357,524,000	98.36	39,328,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	570,341,000	633,979,000	573,474,268	0	573,474,268	90.46	60,504,732
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,861,923,000	3,248,465,000	3,243,933,240	144,840	3,243,788,400	99.86	4,676,600
511129	Belanja Uang Makan PNS	10,555,990,000	9,112,266,000	8,614,858,000	37,000	8,614,821,000	94.54	497,445,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,260,765,000	924,819,000	920,285,000	1,840,000	918,445,000	99.31	6,374,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	94,740,404,000	84,122,045,000	83,407,467,963	31,094,742	83,376,373,221	99.11	745,671,779
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	5,240,771,000	8,688,452,000	8,672,751,356	3,694,769	8,669,056,587	99.78	19,395,413
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,050,000	368,000	178,267	723	177,544	48.25	190,456
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	332,901,000	525,186,000	515,906,307	377,660	515,528,647	98.16	9,657,353
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	247,217,000	151,969,000	142,488,635	75,532	142,413,103	93.71	9,555,897
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	533,300,000	287,489,000	277,780,000	0	277,780,000	96.62	9,709,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	367,563,000	550,328,000	535,376,920	217,260	535,159,660	97.24	15,168,340
511628	Belanja Uang Makan PPPK	990,206,000	1,873,777,000	1,783,377,000	0	1,783,377,000	95.18	90,400,000
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	529,594,000	356,162,000	353,040,881	0	353,040,881	99.12	3,121,119
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	77,250,000	76,160,000	5,000	76,155,000	98.58	1,095,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	8,248,602,000	12,510,981,000	12,357,059,366	4,370,944	12,352,688,422	98.73	158,292,578
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,162,057,000	790,586,000	693,014,300	138,000	692,876,300	87.64	97,709,700
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	177,070,000	182,829,000	146,274,600	0	146,274,600	80.01	36,554,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,339,127,000	973,415,000	839,288,900	138,000	839,150,900	86.21	134,264,100
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	87,671,982,000	86,794,459,000	86,058,084,972	8,745,863	86,049,339,109	99.14	745,119,891
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	7,890,169,000	11,224,249,000	11,157,564,489	347,555	11,157,216,934	99.4	67,032,066
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	95,562,151,000	98,018,708,000	97,215,649,461	9,093,418	97,206,556,043	99.17	812,151,957
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	199,890,284,000	195,625,149,000	193,819,465,690	44,697,104	193,774,768,586	99.05	1850380414
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,057,009,000	12,831,472,000	12,772,089,163	0	12,772,089,163	99.54	59,382,837

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/26 3:04 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	5,736,000	5,736,000	5,734,700	0	5,734,700	99.98	1,300
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	493,140,000	131,545,000	131,407,609	0	131,407,609	99.9	137,391
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	185,444,000	42,790,000	33,873,399	0	33,873,399	79.16	8,916,601
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	2,775,856,000	1,998,497,000	1,982,521,000	0	1,982,521,000	99.2	15,976,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,399,728,000	3,242,652,000	2,998,412,251	0	2,998,412,251	92.47	244,239,749
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	18,916,913,000	18,252,692,000	17,924,038,122	0	17,924,038,122	98.2	328,653,878
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	16,676,314,000	21,945,500,000	17,603,698,371	2,005,720	17,601,692,651	80.21	4,343,807,349
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	4,229,979,000	1,766,997,000	1,752,228,000	0	1,752,228,000	99.16	14,769,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12,472,566,000	7,704,349,000	5,093,318,380	36,600,000	5,056,718,380	65.63	2,647,630,620
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	105,607,000	105,524,080	0	105,524,080	99.92	82,920
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	33,378,859,000	31,522,453,000	24,554,768,831	38,605,720	24,516,163,111	77.77	7,006,289,889
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,203,122,000	76,011,579,000	72,357,066,118	0	72,357,066,118	95.19	3,654,512,882
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	206,513,000	143,310,000	102,780,850	0	102,780,850	71.72	40,529,150
521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	1,014,362,000	1,007,425,000	869,615,750	0	869,615,750	86.32	137,809,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	30,423,997,000	77,162,314,000	73,329,462,718	0	73,329,462,718	95.03	3,832,851,282
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	36,342,703,000	31,502,909,000	30,769,658,520	0	30,769,658,520	97.67	733,250,480
522112	Belanja Langganan Telepon	235,440,000	171,287,000	170,261,875	0	170,261,875	99.4	1,025,125
522113	Belanja Langganan Air	74,200,000	73,000,000	71,003,900	0	71,003,900	97.27	1,996,100
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,599,138,000	1,365,425,000	1,346,460,770	0	1,346,460,770	98.61	18,964,230
522131	Belanja Jasa Konsultan	37,587,975,000	55,673,264,000	47,619,191,414	896,085,840	46,723,105,574	83.92	8,950,158,426
522141	Belanja Sewa	4,106,951,000	3,977,568,000	3,358,485,029	0	3,358,485,029	84.44	619,082,971
522151	Belanja Jasa Profesi	2,265,100,000	2,507,930,000	1,763,688,000	13,435,000	1,750,253,000	69.79	757,677,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	38,594,377,000	42,063,271,000	40,742,691,785	21,994,169	40,720,697,616	96.81	1,342,573,384
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	120,805,884,000	137,334,654,000	125,841,441,293	931,515,009	124,909,926,284	90.95	12,424,727,716
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,561,935,000	7,998,282,000	7,738,399,409	120,000	7,738,279,409	96.75	260,002,591
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,452,639,000	4,291,000,000	4,283,077,545	0	4,283,077,545	99.82	7,922,455
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,140,115,000	11,285,629,000	11,157,221,146	500	11,157,220,646	98.86	128,408,354
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	134,234,000	185,813,000	160,056,810	0	160,056,810	86.14	25,756,190
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,332,161,000	721,516,000	721,168,589	0	721,168,589	99.95	347,411
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	173,200,000	274,241,000	274,240,878	0	274,240,878	100	122
523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	211,040,000	583,836,000	577,428,500	0	577,428,500	98.9	6,407,500
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	549,974,000	415,384,000	414,780,928	0	414,780,928	99.85	603,072

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/26 3:04 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	108,000,000	35,805,000	35,800,000	0	35,800,000	99.99	5,000
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	40,000,000	35,160,000	35,156,360	0	35,156,360	99.99	3,640
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	23,703,298,000	25,826,666,000	25,397,330,165	120,500	25,397,209,665	98.34	429,456,335
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47,900,293,000	56,552,428,000	28,785,405,680	347,909,845	28,437,495,835	50.29	28,114,932,165
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,385,144,000	531,273,000	438,840,092	32,540,000	406,300,092	76.48	124,972,908
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,956,046,000	1,347,211,000	991,211,450	9,857,250	981,354,200	72.84	365,856,800
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16,929,867,000	7,090,124,000	3,190,528,582	14,468,729	3,176,059,853	44.8	3,914,064,147
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	70,171,350,000	65,521,036,000	33,405,985,804	404,775,824	33,001,209,980	50.37	32,519,826,020
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	4,799,200,000	5,414,962,000	826,849,110	85,937,000	740,912,110	13.68	4,674,049,890
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	4,799,200,000	5,414,962,000	826,849,110	85,937,000	740,912,110	13.68	4,674,049,890
5251	Belanja Barang BLU							
525112	Belanja Barang	1,029,490,000	3,579,623,000	2,507,621,726	0	2,507,621,726	70.05	1,072,001,274
525113	Belanja Jasa	3,455,867,000	7,176,643,000	4,938,799,464	0	4,938,799,464	68.82	2,237,843,536
525114	Belanja Pemeliharaan	0	1,461,184,000	1,256,156,631	0	1,256,156,631	85.97	205,027,369
525115	Belanja Perjalanan	1,298,026,000	2,052,726,000	1,115,487,623	0	1,115,487,623	54.34	937,238,377
525118	Belanja Ketersediaan Layanan BLU	1,214,504,000	1,004,534,000	100,030,000	0	100,030,000	9.96	904,504,000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	504,397,000	489,396,336	0	489,396,336	97.03	15,000,664
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	21,102,601,000	47,505,474,000	32,634,374,568	0	32,634,374,568	68.7	14,871,099,432
525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi	4,118,798,000	2,833,162,000	2,155,881,500	0	2,155,881,500	76.09	677,280,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	32,219,286,000	66,117,743,000	45,197,747,848	0	45,197,747,848	68.36	20,919,995,152
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada	3,240,000,000	0	0	0	0	0	0
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	40,912,915,000	115,701,187,000	111,065,157,719	0	111,065,157,719	95.99	4,636,029,281
526124	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	49,152,915,000	115,701,187,000	111,065,157,719	0	111,065,157,719	95.99	4,636,029,281
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada							
526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	95,523,666,000	3,193,286,000	39,690,835	0	39,690,835	1.24	3,153,595,165
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	95,523,666,000	3,193,286,000	39,690,835	0	39,690,835	1.24	3,153,595,165
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	479,095,368,000	546,046,993,000	457,582,472,445	1,460,954,053	456,121,518,392	83.53	89925474608
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,867,288,000	82,408,136,000	55,087,853,917	0	55,087,853,917	66.85	27,320,282,083
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	51,867,288,000	82,408,136,000	55,087,853,917	0	55,087,853,917	66.85	27,320,282,083

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 04

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 11/05/26 3:04 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	189,106,000,000	344,220,217,000	115,421,378,153	0	115,421,378,153	33.53	228,798,838,847
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	248,211,524,000	247,791,637,449	0	247,791,637,449	99.83	419,886,551
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	189,106,000,000	592,431,741,000	363,213,015,602	0	363,213,015,602	61.31	229,218,725,398
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	2,133,157,000	2,104,114,532	0	2,104,114,532	98.64	29,042,468
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	2,133,157,000	2,104,114,532	0	2,104,114,532	98.64	29,042,468
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	11,615,500,000	11,380,756,500	0	11,380,756,500	97.98	234,743,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	0	11,615,500,000	11,380,756,500	0	11,380,756,500	97.98	234,743,500
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1,439,720,000	3,669,720,000	2,225,149,508	0	2,225,149,508	60.64	1,444,570,492
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,166,000,000	1,166,000,000	0	0	0	0	1,166,000,000
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	324,994,000	324,994,000	0	0	0	0	324,994,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	2,930,714,000	5,160,714,000	2,225,149,508	0	2,225,149,508	43.12	2,935,564,492
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	243,904,002,000	693,749,248,000	434,010,890,059	0	434,010,890,059	62.56	259738357941
	JUMLAH BELANJA	922,889,654,000	1,435,421,390,000	1,085,412,828,194	1,505,651,157	1,083,907,177,037	75.51	351,514,212,963

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:03 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	125,066,911,108	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	100,000,000,000	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,930,041,658	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,514,176,953	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	8,930,041,658
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	809,281,819
0.0	117111	Barang Konsumsi	40,623,638,997	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	28,050,498	0
0.0	117114	Suku Cadang	662,644,831	0
0.0	117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	11,089,686,917	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	59,685,994,122	0
0.0	117131	Bahan Baku	2,777,304,513	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	11,315,892,997	0
0.0	131111	Tanah	3,792,279,477,365	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	952,688,528,934	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,416,541,076,707	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	76,495,798,435	0
0.0	134112	Irigasi	421,967,484,902	0
0.0	134113	Jaringan	54,465,892,504	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	2,818,527,559	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,766,359,010	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	333,300,821,067	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	807,462,885,109
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	347,393,646,959
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	42,221,531,746
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	247,937,269,299
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	14,728,994,297
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	279,034,045
0.0	138311	Properti Investasi	38,572,215,000	0
0.0	138411	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0	7,154,978,387
0.0	162151	Software	15,680,025,748	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	442,515,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	257,258,170,168	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	131,008,126,009	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1,512,645,250	0
0.0	166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	44,677,200	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	125,312,891,807

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:03 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	5,697,368,228
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	1,512,645,250
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	54,588,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,572,003,341
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	192,848,228,540
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	1,209,846,385
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	60,230,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,036,484,279,681
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	20,238,353,486	0
0.0	313211	Transfer Keluar	58,498,531,759	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	58,498,531,759
0.0	391111	Ekuitas	0	5,462,922,038,268
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	2,370,100	0
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2,599,941,663	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	1,720,722,000
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	24,872,877
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	3,862,926,149
0.0	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,981,818,514
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	4,482,000	0
3.0	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	0	522,040,000
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	705,655,500
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	158,828,863,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	6,338,656,931
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	31,960,403,667
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	78,553,533
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	546,155,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	61,519,640
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	9,090,940,733
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	916,626,100
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	684,852,248
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,714,677,074
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,973,966,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	16,965,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	404,344,485
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	407,092
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	25,534,387
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	242,851,572

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:03 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
		Lalu		
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,100,000
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	132,245,612,019
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	793,138,275
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	60,825,764,157	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	34,773,809	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	4,672,031,088	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,439,292,629	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	737,455,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,357,524,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	573,314,882	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	3,243,788,400	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	8,543,095,900	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	918,445,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	8,669,056,587	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	177,544	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	515,528,647	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	142,413,103	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	277,780,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	535,159,660	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,801,422,900	0
3.0	511629	Beban Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	353,040,881	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	76,155,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	692,876,300	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	146,274,600	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	85,927,180,363	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	11,127,396,574	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	12,772,089,163	0
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	5,734,700	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	131,407,609	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33,873,399	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,982,521,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	2,858,831,841	0
3.0	521211	Beban Bahan	17,563,827,708	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,752,228,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	5,056,718,380	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	31,729,400	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	30,196,925,293	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:03 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	185,802,307	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	71,003,900	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,348,256,172	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	46,095,465,574	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,358,485,029	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,750,253,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	45,324,173,687	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,445,592,690	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,015,880,545	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,155,120,646	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	721,168,589	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	274,240,878	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	577,428,500	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	414,780,928	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	35,156,360	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28,444,022,755	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	406,300,092	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	981,354,200	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,176,059,853	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	740,912,110	0
3.0	525112	Beban Barang	2,507,621,726	0
3.0	525113	Beban Jasa	4,914,159,464	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	1,256,156,631	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	1,115,487,623	0
3.0	525118	Beban Ketersediaan Layanan BLU	100,030,000	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	489,396,336	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	39,626,560,151	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38,616,075,532	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	4,528,940,743	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	11,378,181,518	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,690,385,029	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	58,773,206	0
3.0	591611	Beban Penyusutan Properti Investasi	6,208,936,901	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	1,900,781,388	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,336,557,668	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	51,375,870,356	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	123,875,172	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	3,781,012,317	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:03 PM

Halaman : 5

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	593123	Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	43,482,703,290	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4,264,977,428	0
3.0	593127	Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	4,241,915,500	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	46,888,928,372	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	7,842,648,242	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	6,332,504,624	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	990,186,455	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	112,135	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	68,066,543,012	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	333,991,330	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1,992,550,433	0
JUMLAH			8,719,843,516,374	8,719,843,516,374

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:03 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,083,907,177,037
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	219,506,674,207	0
3.0	424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan TeKnologi	0	582,270,000
3.0	424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	709,405,500
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	158,828,863,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	6,338,656,931
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	32,126,287,117
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	78,553,533
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	546,515,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	61,519,640
3.0	425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	9,090,940,733
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	916,626,100
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,760,616,989
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	1,714,677,074
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	2,973,966,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	16,965,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	404,344,485
3.0	425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	407,092
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	25,534,387
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,006,986,908
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	327,288,718
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	60,840,859,730	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	789,228	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4,672,479,858	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,439,474,639	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	737,455,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,363,859,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	573,474,268	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,243,933,240	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	8,614,858,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	920,285,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	8,672,751,356	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	178,267	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	515,906,307	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	142,488,635	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	277,780,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	535,376,920	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:03 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	1,783,377,000	0
3.0	511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	353,040,881	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	76,160,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	693,014,300	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	146,274,600	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	86,058,084,972	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	11,157,564,489	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,772,089,163	0
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	5,734,700	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	131,407,609	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33,873,399	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,982,521,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,998,412,251	0
3.0	521211	Belanja Bahan	17,603,698,371	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,752,228,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5,093,318,380	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	105,524,080	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	72,357,066,118	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	102,780,850	0
3.0	521822	Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	869,615,750	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	30,769,658,520	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	170,261,875	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	71,003,900	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,346,460,770	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	47,619,191,414	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,358,485,029	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,763,688,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	40,742,691,785	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,738,399,409	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	4,283,077,545	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,157,221,146	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160,056,810	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	721,168,589	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	274,240,878	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	577,428,500	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	414,780,928	0
3.0	523136	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	35,800,000	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	35,156,360	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:03 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,785,405,680	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	438,840,092	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	991,211,450	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,190,528,582	0
3.0	524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	826,849,110	0
3.0	525112	Belanja Barang	2,507,621,726	0
3.0	525113	Belanja Jasa	4,938,799,464	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	1,256,156,631	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	1,115,487,623	0
3.0	525118	Belanja Ketersediaan Layanan BLU	100,030,000	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	489,396,336	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	32,634,374,568	0
3.0	525126	Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi - BLU	2,155,881,500	0
3.0	526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	111,065,157,719	0
3.0	526311	Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	39,690,835	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,087,853,917	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115,421,378,153	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	247,791,637,449	0
3.0	534141	Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	2,104,114,532	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	11,380,756,500	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2,225,149,508	0
3.1	424119	Pengembalian Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	3,750,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	22,477,173
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	8,169
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	180,400
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	72,160
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	6,335,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	144,840
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	37,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,840,000
3.1	511611	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PPPK	0	3,694,769
3.1	511619	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	723
3.1	511621	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	377,660
3.1	511622	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	75,532
3.1	511625	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	217,260
3.1	511633	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	5,000
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	138,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:03 PM

Halaman : 4

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	8,745,863
3.1	512414	Pengembalian Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	347,555
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	2,005,720
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	36,600,000
3.1	522131	Pengembalian Belanja Jasa Konsultan	0	896,085,840
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	13,435,000
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	21,994,169
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	120,000
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	500
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	347,909,845
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	32,540,000
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	9,857,250
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	14,468,729
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	85,937,000
JUMLAH			1,304,923,252,401	1,304,923,252,401

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:00 PM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	14,886,152,632	20,030,179,618	(5,144,026,986)	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	199,041,847,271	92,579,845,639	106,462,001,632	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	213,927,999,903	112,610,025,257	101,317,974,646	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	213,927,999,903	112,610,025,257	101,317,974,646	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	193,609,947,024	185,887,444,571	7,722,502,453	-
Beban Persediaan	65,551,023,222	93,743,724,753	(28,192,701,531)	-
Beban Barang dan Jasa	178,530,533,688	189,602,200,306	(11,071,666,618)	-
Beban Pemeliharaan	29,800,413,256	39,531,632,420	(9,731,219,164)	-
Beban Perjalanan Dinas	34,864,136,633	91,348,214,338	(56,484,077,705)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	98,878,524,590	334,615,617,843	(235,737,093,253)	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ESELON I : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:00 PM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	106,345,192,136	109,487,602,990	(3,142,410,854)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	112,135	24,302,442	(24,190,307)	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	707,579,882,684	1,044,240,739,663	(336,660,856,979)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(493,651,882,781)	(931,630,714,406)	437,978,831,625	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(67,149,916,912)	(83,310,309,741)	16,160,392,829	-
Pendapatan Pelepasan Aset	916,626,100	2,080,792,147	(1,164,166,047)	-
Beban Pelepasan Aset	68,066,543,012	85,391,101,888	(17,324,558,876)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	130,001,508,035	129,758,868,080	242,639,955	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	133,318,236,253	133,526,391,364	(208,155,111)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,316,728,218	3,767,523,284	(450,795,066)	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	62,851,591,123	46,448,558,339	16,403,032,784	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(430,800,291,658)	(885,182,156,067)	454,381,864,409	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(430,800,291,658)	(885,182,156,067)	454,381,864,409	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (04) DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA

Tgl Data : 11/05/26 12:38 PM

Tgl Cetak : 11/05/26 3:01 PM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,462,922,038,268	5,406,458,171,217	56,463,867,051	1.04
SURPLUS/DEFISIT-LO	(430,800,291,658)	(885,182,156,067)	454,381,864,409	(51.33)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(861,198,886)	2,746,630,973	(3,607,829,859)	(131.35)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	(2,370,100)	1,617,942,116	(1,620,312,216)	(100.15)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(4,482,000)	154,864,732	(159,346,732)	(102.89)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(879,219,663)	614,458,132	(1,493,677,795)	(243.09)
LAIN-LAIN	24,872,877	359,365,993	(334,493,116)	(93.08)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,022,090,670,858	938,899,392,145	83,191,278,713	8.86
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	590,429,180,314	56,463,867,051	533,965,313,263	945.68
EKUITAS AKHIR	6,053,351,218,582	5,462,922,038,268	590,429,180,314	10.81

Keterangan :

FINAL